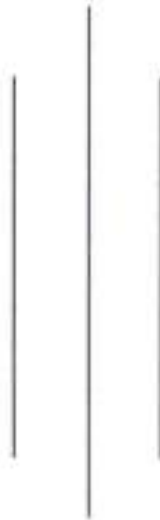




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

TAHUN 2022



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2023

Jl. Kusuma Bangsa No. 32 Lamongan Kode Pos 62217

Telp.(0322)321704 Fax.316147

E-mail.dinsos@lamongankab.go.id, website:www.lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berakhir berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dari setiap kegiatan yang dikerjakan terkait dengan penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD, sebagaimana yang disepakati pada tahun awal anggaran. Kemudian pengukuran kinerja tersebut dilihat menurut indikator kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana pada Renstra OPD dan Renja OPD Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Dari Pengukuran Kinerja dapat dievaluasi keberhasilan dan kegagalan program / kegiatan dan kebijakan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Harapan kami semoga LKjIP ini bermanfaat dan dipedomani bagi aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Lamongan, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN**
Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	4
1. Personil	4
2. Sarana dan Prasarana	5
3. Pembiayaan	15
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	27
A. RENCANA STRATEGIS	27
1. Tujuan	29
2. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	29
B RENCANA KINERJA TAHUN 2022.....	31
Program dan Kegiatan.....	31
C PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	35
Tabel Rekap Perjanjian Kinerja Eselon II s/d JFT.....	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	41
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	41
A.1 Pencapaian Kinerja.....	42
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	42
- Tabel A.2 Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	43
- Grafik A.2.1 Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	43
Tabel PPKS Tahun 2022.....	44
Tabel PSKS Tahun 2022.....	44
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	45
- Tabel A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	46
- Grafik A.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	46 47
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	
- Tabel A.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi	47

	Nasional.....	
	- Grafik A.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	48
	A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan.....	48
	A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	
	A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja.....	49
B	REALISASI ANGGARAN	53
BAB IV	PENUTUP	65
1.	Kesimpulan.....	65
2.	Saran.....	65

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran lainnya (penghargaan, Inovasi dll).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Sosial di Kabupaten Lamongan, peningkatan kapasitas yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) 2021-2026 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 diwujudkan dalam 7 Program (meliputi 6 Program Pembangunan dan 1 Program Rutin), 14 kegiatan (meliputi 7 kegiatan pembangunan dan 7 kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) dan 52 kegiatan (meliputi 31 Sub Kegiatan pembangunan dan 21 Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) dimana program – program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 2. Program Pemberdayaan Sosial:
 - 2.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.1.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- 3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan:
 - 3.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;

- 3.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
4. Program Rehabilitas Sosial:
 - 4.1. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
 - 4.1.1. Penyediaan Permakanan;
 - 4.1.2. Penyediaan Sandang;
 - 4.1.3. Penyediaan Alat Bantu;
 - 4.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - 4.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - 4.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - 4.1.7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;
 - 4.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - 4.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - 4.1.10. Pembelian Layanan Kedaruratan;
 - 4.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial:
 - 5.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.2. Pengelolaaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.3. Fasilitas Bantuan Sosial Kekeluargaan
 - 5.1.4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
6. Program Penanganan Bencana:
 - 6.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - 6.1.1. Penyediaan Makanan;
 - 6.1.2. Penyediaan Sandang;
 - 6.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - 6.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

- 6.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial
- 6.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - 6.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - 6.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Taruna Bencana
- 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan:
 - 7.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - 7.1.1. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - 7.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - 7.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan merupakan suatu upaya terarah, sistematis yang dilakukan menuju perubahan yang lebih baik dari kondisi terdahulu. Perubahan yang dimaksud adalah gerakan menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah sebagai urusan wajib dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada gilirannya diharapkan upaya ini mampu meningkatkan kesejahteraan PMKS dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Lamongan, komitmen pembangunan di bidang sosial tersebut telah menjadi agenda utama pembangunan tahun 2021-2026, yaitu upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik*, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda utama pembangunan daerah tersebut sesungguhnya merupakan respon atas permasalahan kemiskinan yang masih cukup tinggi termasuk didalamnya penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan membentuk Dinas Sosial, Pembentukan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang mencakup Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan di bidang Sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, tiap akhir tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasar pada :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Permendagri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat sebagai sistem lacak kinerja masing-masing program pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Penilaian atas keberhasilan/kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai/diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau kurang.

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan dan Perbup 86 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi :

1. Tugas Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.

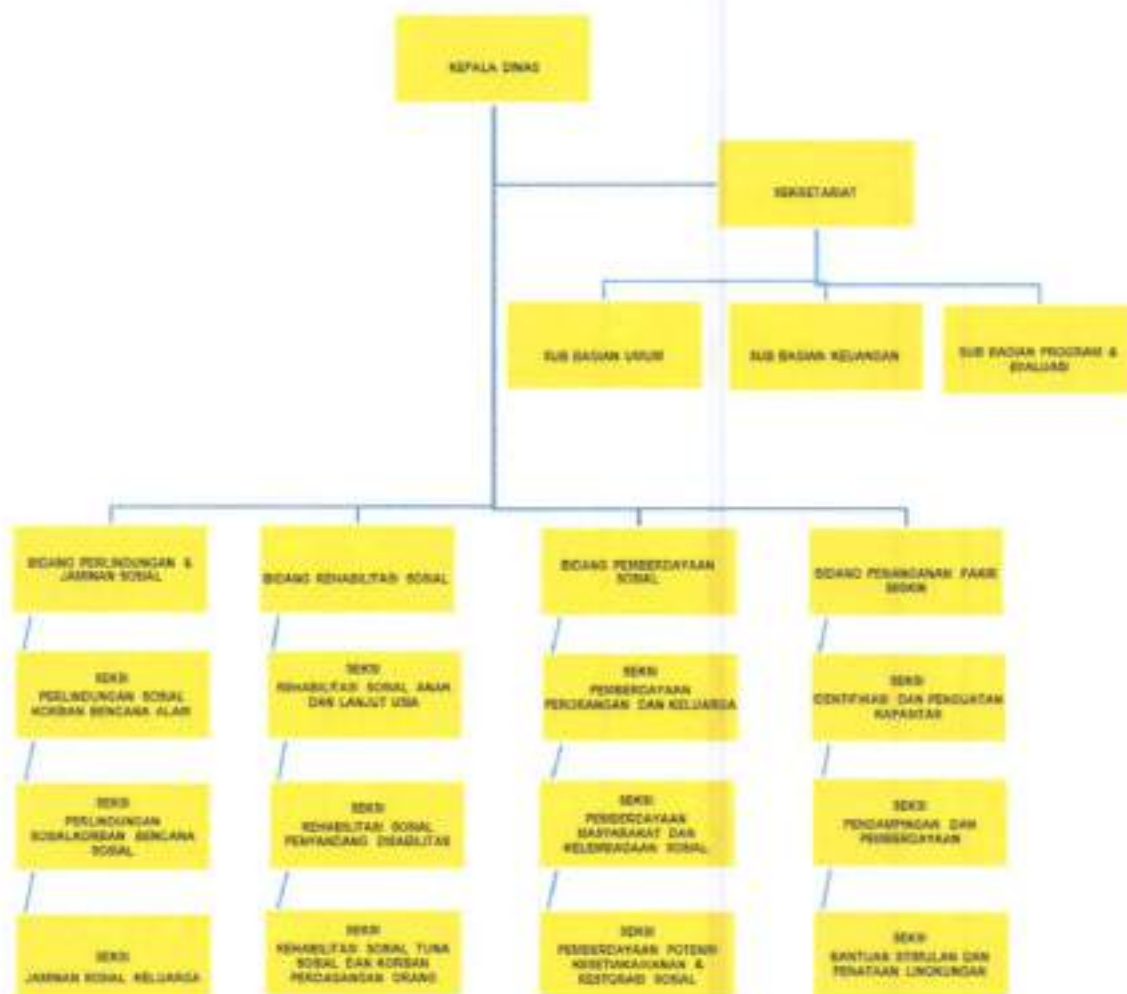
2. Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :

- a. Pengendalian perencanaan bidang sosial;
- b. Pembinaan pelayanan umum bidang sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- d. Pembinaan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- e. Pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- f. Evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- g. Pembinaan administrasi dinas di bidang sosial;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi di bawah ini :

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
Perbup Nomor : 86 Tahun 2020



C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan didukung oleh 55 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan Magister (S2).

NO	JABATAN STRUKTURAL	JMLH	PANGKAT / GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN FORMAL	JMLH	KET
1	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S2	1	
2	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
3	Kepala Bidang	4	Pembina (IV/a)	4	S.2	4	
4	Kepala Seksi/JFT	15	Pembina (IV/a)	3	S.2	3	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S.2	1	
				11	S.1	11	
5	Staf	5	Penata Muda Tk. I (III/c)	1	S.2	1	
			Penata Muda (III/b)	1	S.1	1	
				1	SLTA	1	
				1	D.3	1	
			Penata Muda (III/a)	1	S.1	1	
JUMLAH		26		26		26	

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

Tabel 2.2.2
Data Sarana dan Prasarana
di DINAS SOSIAL Kab. Lamongan Tahun 2022

NO	JENIS BARANG	BAIK	NILAI (Rp)	RUSAK ATAU TIDAK DI GUNAKAN	NILAI (Rp)	JUMLAH
1	tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	758,000,000.00	0	0	1
2	tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1,300,000,000.00	0	0	1
3	tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3,625,000,000.00	0	0	1
4	tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	17,000,000.00	0	0	1
5	Station Wagon (Station Wagon)	1	137,000,000.00	0	0	1
6	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,639,000.00	0	0	1
7	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	28,964,000.00	0	0	1
8	Printer (Printer)	1	6,514,000.00	0	0	1
9	Server (Server)	1	128,283,000.00	0	0	1
10	Jeep (Jeep)	1	199,028,545.00	0	0	1
11	Station Wagon (Station Wagon)	1	125,000,000.00	0	0	1
12	Station Wagon (Station Wagon)	1	120,000,000.00	0	0	1
13	Station Wagon (Station Wagon)	1	213,858,962.00	0	0	1
14	Station Wagon (Station Wagon)	1	157,200,000.00	0	0	1
15	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) (Station Wagon)	1	201,398,000.00	0	0	1
16	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	13,670,000.00	0	0	1
17	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	11,600,000.00	0	0	1
18	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	2,000,000.00	0	0	1
19	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	5,500,000.00	0	0	1
20	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	9,891,611.00	0	0	1
21	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	12,672,000.00	0	0	1
22	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	18,255,000.00	0	0	1
23	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	5,000,000.00	0	0	1
24	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	13,670,000.00	0	0	1
25	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	13,670,000.00	0	0	1
26	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	5,000,000.00	0	0	1
27	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	5,000,000.00	0	0	1
28	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	5,000,000.00	0	0	1
29	Sepeda Motor (Sepeda Motor)	1	5,000,000.00	0	0	1
30	Tossa roda tiga ()	1	53,000,000.00	0	0	1
31	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	2,243,500.00	0	0	1
32	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3,089,670.00	0	0	1
33	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	5,021,000.00	0	0	1
34	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	5,021,000.00	0	0	1
35	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3,089,666.00	0	0	1
36	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3,089,666.00	0	0	1

DINAS SOSIAL

37	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	5,267,700.00	0	0	1
38	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3,089,666.00	0	0	1
39	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3,089,666.00	0	0	1
40	Lemari Besi/kayu (Lemari Besi / Metal)	1	3,089,666.00	0	0	1
41	Rak Besi/Metal (Rak Besi / Metal)	1	1,853,750.00	0	0	1
42	Rak Besi/Metal (Rak besi)	1	6,000,000.00	0	0	1
43	Rak Kayu (Rak Kayu)	1	1,750,000.00	0	0	1
44	Filling Besi/Metal (Filling Besi / Metal)	1	2,500,000.00	0	0	1
45	Filling Besi/Metal (Filling Besi / Metal)	1	2,238,000.00	0	0	1
46	Band Kas (Band Kas)	1	3,605,000.00	0	0	1
47	Papan Nama Instansi (Papan Nama Kantor)	1	3,203,600.00	0	0	1
48	Faximile (Faximile)	1	3,123,800.00	0	0	1
49	Lemari Kayu (Lemari Kayu)	1	2,000,000.00	0	0	1
50	Lemari Kayu (Lemari Kayu)	1	3,250,000.00	0	0	1
51	Lemari Kayu (Lemari Kayu)	1	1,000,000.00	0	0	1
52	Meja Rapat (Meja Rapat)	1	2,825,000.00	0	0	1
53	Meja Rapat (Meja Rapat)	1	4,453,300.00	0	0	1
54	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
55	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,770,668.00	0	0	1
56	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
57	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	899,500.00	0	0	1
58	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	899,500.00	0	0	1
59	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
60	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,770,666.00	0	0	1
61	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
62	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
63	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,770,666.00	0	0	1
64	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
65	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	899,500.00	0	0	1
66	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
67	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
68	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
69	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
70	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
71	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
72	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
73	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
74	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
75	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
76	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
77	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
78	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
79	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	2,500,000.00	0	0	1
80	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
81	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
82	Meja Tulis (Meja Tulis)	1	1,000,000.00	0	0	1
83	Meja Telpn (Meja Telepon)	1	750,000.00	0	0	1
84	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
85	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
86	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
87	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
88	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
89	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
90	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
91	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
92	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
93	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	1	2,003,100.00	0	0	1
94	Kursi tamu (Kursi Tamu)	1	3,500,000.00	0	0	1
95	Kursi tamu (Kursi Tamu)	1	10,000,000.00	0	0	1

96	Kursi tamu (Kursi Tamu)	1	750,000.00	0	0	1
97	Kursi tamu (Kursi Tamu Eselon II)	1	2,901,700.00	0	0	1
98	Kursi Putar (Kursi Putar)	1	1,598,668.00	0	0	1
99	Kursi Putar (Kursi Putar)	1	1,598,668.00	0	0	1
100	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
101	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760,500.00	0	0	1
102	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760,500.00	0	0	1
103	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
104	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
105	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760,500.00	0	0	1
106	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760,500.00	0	0	1
107	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
108	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
109	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	760,500.00	0	0	1
110	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	733,400.00	0	0	1
111	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
112	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
113	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	733,400.00	0	0	1
114	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	733,400.00	0	0	1
115	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
116	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
117	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
118	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
119	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	750,000.00	0	0	1
120	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
121	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
122	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
123	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
124	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
125	Kursi Lipat (kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
126	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
127	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
128	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
129	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
130	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
131	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
132	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
133	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
134	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
135	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	731,400.00	0	0	1
136	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
137	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
138	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
139	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
140	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
141	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
142	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
143	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
144	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
145	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
146	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
147	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
148	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
149	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
150	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
151	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
152	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
153	Kursi Lipat (Kursi Lipat)	1	631,100.00	0	0	1
154	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,300.00	0	0	1
155	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,300.00	0	0	1
156	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,300.00	0	0	1

157	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,300.00	0	0	1
158	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
159	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
160	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
161	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
162	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
163	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
164	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
165	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
166	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
167	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
168	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
169	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
170	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
171	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
172	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
173	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
174	Meja Komputer (Meja Komputer)	1	1,160,800.00	0	0	1
175	Rak Besi/Metal (Rack Server)	1	13,003,000.00	0	0	1
176	Kursi Pelayanan (Kursi Pelayanan SLRT)	1	1,998,300.00	0	0	1
177	Kursi Pelayanan (Kursi Pelayanan SLRT)	1	1,998,300.00	0	0	1
178	Meja Pelayanan (Meja Pelayanan SLRT)	1	12,816,700.00	0	0	1
179	Meja Pelayanan (Meja Pelayanan)	1	4,147,000.00	0	0	1
180	Kursi Tunggu (Kursi Tunggu)	1	7,414,700.00	0	0	1
181	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,323,200.00	0	0	1
182	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,323,200.00	0	0	1
183	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,323,200.00	0	0	1
184	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,323,200.00	0	0	1
185	Meja Kerja (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,323,200.00	0	0	1
186	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi)	1	3,057,400.00	0	0	1
187	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi Kaca)	1	3,500,000.00	0	0	1
188	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi Kaca)	1	3,500,000.00	0	0	1
189	Lemari Arsip Besi (Almari Arsip Besi Kaca)	1	3,500,000.00	0	0	1
190	Lemari Arsip Besi (Lemari Besi Arsip)	1	3,955,500.00	0	0	1
191	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7,291,300.00	0	0	1
192	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7,291,300.00	0	0	1
193	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7,291,300.00	0	0	1
194	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7,291,300.00	0	0	1
195	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	7,291,300.00	0	0	1
196	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8,841,000.00	0	0	1
197	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8,842,000.00	0	0	1
198	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8,842,000.00	0	0	1
199	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8,842,000.00	0	0	1
200	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8,842,000.00	0	0	1
201	Lemari Arsip (Almari Arsip Besi)	1	8,842,000.00	0	0	1
202	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	4,784,400.00	0	0	1
203	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	4,784,400.00	0	0	1
204	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	4,784,400.00	0	0	1
205	Lemari Arsip (Lemari Arsip)	1	3,385,200.00	0	0	1
206	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,547,600.00	0	0	1
207	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,547,600.00	0	0	1
208	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,547,600.00	0	0	1
209	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,547,600.00	1	0	1
210	Kursi Kerja (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,547,600.00	0	0	1
211	Meja Kerja Pimpinan (Meja Kerja)	1	4,500,000.00	0	0	1
212	Lemari Es (Lemari ES)	1	4,813,800.00	0	0	1
213	Lemari Es (Lemari ES)	1	4,813,800.00	0	0	1

214	AC Unit (AC Unit)	1	4,118,500.00	0	0	1
215	AC Unit (AC Unit)	1	17,221,700.00	0	0	1
216	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
217	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
218	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
219	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
220	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
221	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
222	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
223	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
224	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
225	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
226	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
227	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
228	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
229	AC Unit (AC Split 1 Pk)	1	7,269,300.00	0	0	1
230	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	762,400.00	0	0	1
231	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	762,400.00	0	0	1
232	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	761,400.00	0	0	1
233	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857,400.00	0	0	1
234	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857,400.00	0	0	1
235	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857,400.00	0	0	1
236	Kipas Angin (Kipas Angin)	1	857,400.00	0	0	1
237	Dispenser (Dispenser)	1	3,147,900.00	0	0	1
238	Dispenser (Dispenser)	1	3,147,900.00	0	0	1
239	Sound System (Sound System)	1	6,444,000.00	0	0	1
240	Mesin Jahit (Mesin Jahit)	1	10,769,800.00	0	0	1
241	Mesin Jahit (Mesin Jahit)	1	10,769,800.00	0	0	1
242	Mesin Jahit (Mesin Jahit)	1	10,769,800.00	0	0	1
243	Mesin Jahit (Mesin Jahit)	1	10,769,800.00	0	0	1
244	Mesin Jahit (Mesin Jahit)	1	10,769,800.00	0	0	1
245	Tempat Tidur (Tempat Tidur)	1	1,624,000.00	0	0	1
246	Tempat Tidur (Tempat Tidur)	1	1,624,000.00	0	0	1
247	Pompa Air (Pompa Air)	1	1,969,000.00	0	0	1
248	SPRINGBAG (Kasur Busa)	1	3,021,000.00	0	0	1
249	SPRINGBAG (Kasur Busa)	1	3,021,000.00	0	0	1
250	SPRINGBAG (Kasur Busa)	1	3,021,000.00	0	0	1
251	SPRINGBAG (Kasur Busa)	1	3,020,000.00	0	0	1
252	RAK TV (Telivisi)	1	4,693,600.00	0	0	1
253	Alat Pres Kancing (Alat Pres Kancing)	1	1,208,000.00	0	0	1
254	Mesin Obras (Mesin Obras)	1	4,026,000.00	0	0	1
255	Avometer Digital (Avometer Digital)	1	900,650.00	0	0	1
256	Avometer Digital (Avometer Digital)	1	900,650.00	0	0	1
257	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	6,900,000.00	0	0	1
258	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	11,976,000.00	0	0	1
259	P.C. Unit (Komputer)	1	10,319,000.00	0	0	1
260	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	9,047,300.00	0	0	1
261	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	7,995,000.00	0	0	1
262	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	8,200,500.00	0	0	1
263	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	6,518,500.00	0	0	1
264	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	12,000,250.00	0	0	1
265	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	12,000,250.00	0	0	1
266	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	6,518,500.00	0	0	1
267	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	7,995,000.00	0	0	1
268	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	16,631,700.00	0	0	1
269	P.C. Unit (Komputer)	1	10,319,000.00	0	0	1
270	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	8,523,000.00	0	0	1
271	P.C. Unit (PC UNIT)	1	6,192,000.00	0	0	1
272	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	16,631,700.00	0	0	1
273	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	7,995,000.00	0	0	1
274	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	12,000,250.00	0	0	1
275	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	12,000,250.00	0	0	1

276	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
277	P.C. Unit (PC UNIT)	1	6,191,000.00	0	0	1
278	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10,800,000.00	0	0	1
279	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10,800,000.00	0	0	1
280	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
281	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
282	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10,800,000.00	0	0	1
283	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10,800,000.00	0	0	1
284	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
285	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
286	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	10,600,000.00	0	0	1
287	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
288	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
289	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,166,440.00	0	0	1
290	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
291	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
292	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
293	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
294	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
295	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
296	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
297	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
298	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
299	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
300	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
301	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,167,440.00	0	0	1
302	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	17,057,440.00	0	0	1
303	P.C. Unit (P.C. Unit)	1	14,851,800.00	0	0	1
304	Lap Top (Laptop)	1	9,990,000.00	0	0	1
305	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
306	Lap Top (Lap Top)	1	13,226,152.00	0	0	1
307	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
308	Lap Top (Laptop)	1	9,990,000.00	0	0	1
309	Lap Top (Laptop)	1	9,990,000.00	0	0	1
310	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
311	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
312	Lap Top (Laptop)	1	9,990,000.00	0	0	1
313	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
314	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
315	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
316	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
317	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
318	Lap Top (Laptop)	1	7,044,700.00	0	0	1
319	Lap Top (Laptop)	1	9,601,000.00	0	0	1
320	Lap Top (Laptop)	1	18,752,200.00	0	0	1
321	Lap Top (Laptop)	1	14,373,900.00	0	0	1
322	Lap Top (Laptop)	1	14,373,900.00	0	0	1
323	Lap Top (Laptop)	1	16,139,400.00	0	0	1
324	Lap Top (Laptop)	1	16,139,400.00	0	0	1
325	Note Book (Note Book)	1	9,287,000.00	0	0	1
326	Note Book (Note Book)	1	7,795,000.00	0	0	1
327	Note Book (Note Book)	1	7,100,000.00	1	0	1
328	Note Book (Note Book)	1	7,200,000.00	0	0	1
329	Note Book (Laptop)	1	12,342,900.00	0	0	1
330	Note Book (Laptop)	1	16,037,700.00	1	0	1
331	Note Book (Note Book)	1	7,100,000.00	0	0	1
332	Note Book (Note Book)	1	9,287,000.00	0	0	1
333	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
334	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
335	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
336	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
337	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1

338	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
339	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
340	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
341	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
342	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
343	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
344	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
345	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
346	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
347	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
348	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
349	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
350	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
351	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
352	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
353	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
354	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
355	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
356	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
357	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
358	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
359	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
360	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
361	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
362	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
363	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
364	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
365	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
366	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
367	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
368	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
369	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
370	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
371	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
372	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
373	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
374	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
375	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
376	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
377	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
378	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
379	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
380	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
381	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
382	Tablet (TAB) (Tablet TAB)	1	1,500,000.00	0	0	1
383	Printer (printer)	1	1,208,000.00	0	0	1
384	Printer (Printer)	1	3,243,200.00	0	0	1
385	Printer (Printer)	1	3,243,200.00	0	0	1
386	Printer (Printer)	1	2,512,300.00	0	0	1
387	Printer (Printer)	1	600,000.00	0	0	1
388	Printer (Printer)	1	1,250,000.00	0	0	1
389	Printer (Printer)	1	3,114,900.00	0	0	1
390	Printer (Printer)	1	1,184,500.00	0	0	1

391	Printer (Print)	1	929,000.00	0	0	1
392	Printer (Printer)	1	3,114,900.00	0	0	1
393	Printer (Printer)	1	1,013,667.00	0	0	1
394	Printer (Printer Gaji)	1	12,383,000.00	0	0	1
395	Printer (Printer)	1	600,000.00	0	0	1
396	Printer (Printer)	1	600,000.00	0	0	1
397	Printer (Printer)	1	1,032,000.00	0	0	1
398	Printer (Printer)	1	1,032,000.00	0	0	1
399	Printer (Printer)	1	600,000.00	0	0	1
400	Printer (Printer)	1	1,800,000.00	0	0	1
401	Printer (Printer)	1	4,644,000.00	0	0	1
402	Printer (printer)	1	6,707,000.00	0	0	1
403	Printer (Printer)	1	1,800,000.00	0	0	1
404	Printer (Printer)	1	1,100,000.00	0	0	1
405	Printer (Print)	1	928,000.00	0	0	1
406	Printer (Printer)	1	1,100,000.00	0	0	1
407	Printer (Printer)	1	1,100,000.00	0	0	1
408	Printer (Printer)	1	5,250,000.00	0	0	1
409	Printer (Printer)	1	3,429,200.00	0	0	1
410	Printer (Printer)	1	3,429,200.00	0	0	1
411	Printer (Printer)	1	9,470,500.00	0	0	1
412	Printer (Printer)	1	8,147,400.00	0	0	1
413	Scanner (Scanner)	1	10,736,800.00	0	0	1
414	Scanner (Scanner)	1	12,236,900.00	0	0	1
415	Scanner (Scanner)	1	12,010,200.00	0	0	1
416	Meja Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Eselon II)	1	6,175,000.00	0	0	1
417	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Eselon III)	1	5,660,000.00	0	0	1
418	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	1	5,021,000.00	0	0	1
419	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	1	2,910,100.00	0	0	1
420	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	1	2,199,000.00	0	0	1
421	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Eselon III)	1	5,660,000.00	0	0	1
422	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,396,000.00	0	0	1
423	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1,049,000.00	0	0	1
424	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1,369,613.00	0	0	1
425	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1,349,200.00	0	0	1
426	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1,049,000.00	0	0	1
427	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,396,000.00	0	0	1
428	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,396,000.00	0	0	1
429	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,396,000.00	0	0	1
430	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,396,000.00	0	0	1
431	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,397,000.00	0	0	1
432	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	1	2,510,500.00	0	0	1

433	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2,012,700.00	0	0	1
434	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2,012,700.00	0	0	1
435	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	1	2,510,500.00	0	0	1
436	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2,012,700.00	0	0	1
437	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2,012,700.00	0	0	1
438	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2,012,700.00	0	0	1
439	Meja Kerja Pegawai Non struktural (meja kerja non struktural)	1	2,465,500.00	0	0	1
440	Kursi Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Eselon II)	1	3,911,000.00	0	0	1
441	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Eselon III)	1	2,830,000.00	0	0	1
442	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Kerja Pejabat Eselon III)	1	2,510,000.00	0	0	1
443	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Eselon III)	1	2,830,000.00	0	0	1
444	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,264,000.00	0	0	1
445	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1,944,000.00	0	0	1
446	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	1	1,944,000.00	0	0	1
447	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,264,000.00	0	0	1
448	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,264,000.00	0	0	1
449	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,264,000.00	0	0	1
450	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,264,000.00	0	0	1
451	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,264,000.00	0	0	1
452	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,218.00	0	0	1
453	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805,000.00	0	0	1
454	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805,000.00	0	0	1
455	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
456	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
457	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805,000.00	0	0	1
458	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805,000.00	0	0	1
459	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
460	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
461	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805,000.00	0	0	1
462	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	805,200.00	0	0	1
463	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
464	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
465	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural (kursi kerja non struktural)	1	1,559,800.00	0	0	1
466	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	1,004,214.00	0	0	1

	(Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)					
467	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
468	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
469	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
470	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
471	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
472	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	1	1,004,214.00	0	0	1
473	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu)	1	9,982,000.00	0	0	1
474	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu)	1	9,983,000.00	0	0	1
475	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	514,000.00	0	0	1
476	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	514,000.00	0	0	1
478	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	514,000.00	0	0	1
479	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	514,000.00	0	0	1
480	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	514,000.00	0	0	1
481	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	515,000.00	0	0	1
482	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	515,000.00	0	0	1
483	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	515,000.00	0	0	1
484	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	515,000.00	0	0	1
485	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	515,000.00	0	0	1
486	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III ()	1	515,000.00	0	0	1
487	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3,293,000.00	0	0	1
488	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3,293,000.00	0	0	1
489	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3,293,000.00	0	0	1
490	Lemari Arsip Tinggi (Almari Arsip)	1	3,294,000.00	0	0	1
491	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3,341,000.00	0	0	1
492	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3,341,000.00	0	0	1
493	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3,341,000.00	0	0	1
494	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3,341,000.00	0	0	1
495	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3,342,000.00	0	0	1
496	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3,342,000.00	0	0	1
497	Meja Kerja Staf (Meja Kerja Staf)	1	3,342,000.00	0	0	1
498	Meja Kerja Eselon V (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,718,000.00	0	0	1
499	Meja Kerja Eselon V (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,718,000.00	0	0	1
500	Meja Kerja Eselon V (Meja Kerja Eselon IV)	1	3,719,000.00	0	0	1
501	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,344,000.00	0	0	1
502	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,344,000.00	0	0	1
503	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,344,000.00	0	0	1
504	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,344,000.00	0	0	1
505	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,343,000.00	0	0	1
506	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,343,000.00	0	0	1
507	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,343,000.00	0	0	1
508	Kursi Staff (Kursi Staff)	1	1,343,000.00	0	0	1

509	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,688,000.00	0	0	1
510	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,687,000.00	0	0	1
511	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	1	2,687,000.00	0	0	1
512	Camera + Attachmen (Camera + Attachmen)	1	8,500,000.00	0	0	1
513	Camera + Attachmen (Camera)	1	12,831,600.00	0	0	1
514	LCD Proyektor (LCD Projector)	1	11,961,200.00	0	0	1
515	CCTV (CCTV)	1	11,300,000.00	0	0	1
516	Thermometer Infrared (Termometer Infrared)	1	1,240,000.00	0	0	1
517	Thermometer Infrared (Termometer Infrared)	1	1,241,000.00	0	0	1
518	Thermometer Infrared (Termometer Infrared)	1	1,241,000.00	0	0	1
519	Station Wagon (Station Wagon)	1	259,380,000.00	0	0	1
520	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	343,000,000.00	0	0	1
521	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	199,588,000.00	0	0	1
522	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	20,000,000.00	0	0	1
523	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	191,095,000.00	0	0	1
524	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2,203,000,000.00	0	0	1
525	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	22,500,000.00	0	0	1
526	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	198,515,000.00	0	0	1
527	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	36,000,000.00	0	0	1
528	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	204,279,900.00	0	0	1
529	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	190,000,000.00	0	0	1
530	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	12,500,000.00	0	0	1
531	Jalan Khusus Kompleks	1	197,525,000.00	0	0	1
532	Air Muka Tanah Kapasitas Kecil	1	30,000,000.00	0	0	1
533	Jalan Khusus Kompleks		227,773,000.00	0	0	1
534	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	34,159,000.00	0	0	1
535	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	205,965,500.00	0	0	1

3. Pembiayaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berdasarkan perincian pembiayaan yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 , adalah sebagai berikut :

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KET.
I.	Belanja Daerah	Rp. 22.704.056.545,-	
1.	<u>Belanja Operasi</u>	Rp. 22.211.967.809,-	
	a. Belanja Pegawai	Rp. 3.322.078.940,-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.854.803.000,-	
	c. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.532.400.000,-	
2.	<u>Belanja Modal</u>		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 47.096.000,-	
		Rp. 47.096.000,-	

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) mengacu pada format yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014. Secara umum penyusunan Laporan Kinerja mengikuti prinsip-prinsip kejujuran, obyektif, akurat dan transparan. Format Laporan Kinerja terdiri dari:

- Ringkasan Eksekutif Dalam bagian ini secara umum disajikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sejauhmana Dinas telah mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
- Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Perencanaan dan Perjanjian Kerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran
 - a. Matriks Rencana Strategis (RS)
 - b. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
 - c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - d. Lampiran lainnya (penghargaan, Inovasi dll).

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan memahami substansi LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022, Sistematika pelaporan Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai berikut :

Executive Summary, pada bagian ini diuraikan tentang intisari substansi dari setiap bagian dari Renstra ini.

BAB. I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
- D. Sistematika Penyajian LKjIP Tahun 2022

BAB. II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Rencana Kerja, Program dan Kegiatan Tahun 2022
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB. III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - A.1 Pencapaian Kinerja
 - A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja
 - A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra
 - A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
 - A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan
 - A.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB. IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Matriks Rencana Strategis (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Lampiran lainnya (penghargaan, Inovasi dll).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu memberikan semangat dalam menjalankan roda organisasi.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Lamongan menetapkan visi **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"**

Visi Kabupaten Lamongan tersebut, tidak akan bisa terwujud tanpa adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karenanya setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan harus pula menetapkan visi yang seiring dan sejalan dengan visi Kabupaten Lamongan.

Keunggulan ini dapat diwujudkan dengan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamongan menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya *"Sense of responsibility and professionally"* dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi,

dan peran masing-masing. Sense of responsibility, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara professionally lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

Misi

Misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi dapat terwujud apabila Instansi Pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi masalah dan kendala yang dihadapi.

Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lamongan maka dirumuskan dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman
- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi I dan Misi IV. Misi I **"Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah"** dan Misi IV **"Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius – Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan, serta Lingkungan yang Aman dan Tentram"**. Fokus misi pertama adalah terwujudnya pertumbuhan yang

inklusif. Ekonomi inklusif adalah pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi keluarga dan perempuan terjamin. Selain itu kesejahteraan petani dan penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan. Fokus Misi ke IV yaitu peningkatan kesalehan sosial dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan bagi masyarakat. Representasi ketercapaiannya yakni meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sikap toleran, solidaritas sosial dan stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan serta menjaga nilai-nilai budaya lokal.

Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi I dan IV digambarkan sebagai berikut:



GAMBAR 4.1.1 SASARAN MISI I



GAMBAR 4.1.2 SASARAN MISI IV

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan** dengan indikator

Persentase Penduduk Miskin, dan untuk mencapai Misi IV, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal** dengan indikator **Indeks Kesalehan Sosial**. Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi I dan IV RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1.3 Cascading Misi I Pada RPJMD Tahun 2021-2026



Gambar 4.1.4 Cascading Misi IV Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Sosial telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi I dan IV RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD Misi I yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat"** dengan indikator Persentase PPKS yang Meningkat Kapasitasnya. Sehingga tujuan

dari Dinas Sosial pendukung Sasaran RPJMD Misi I adalah **"Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)"** dengan indikator Persentase PPKS yang Meningkat Kapasitasnya. Sedangkan Sasaran RPJMD Misi IV yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **"Meningkatnya Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong"** dengan indikator Nilai Solidaritas. Sehingga tujuan dari Dinas Sosial pendukung Sasaran RPJMD Misi IV adalah **"Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong"** dengan indikator Persentase Nilai Solidaritas.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

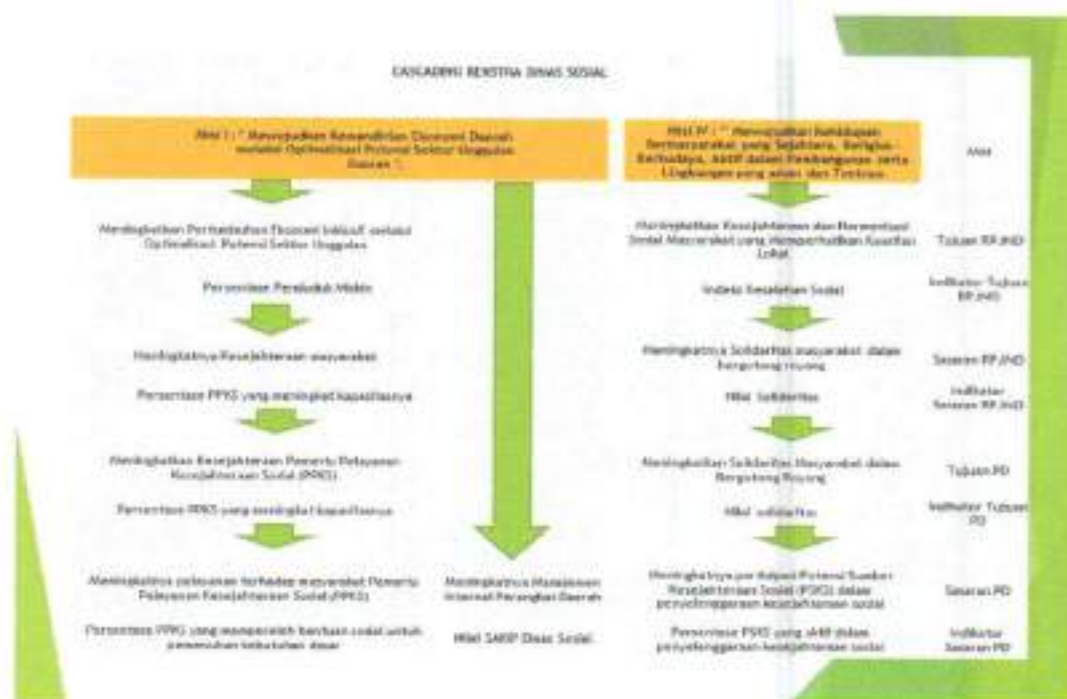
No	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
1	Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya	1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
			2. Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial
2	Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	Nilai Solidaritas	3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Adapun *logical framework* tujuan dan sasaran Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar berikut:



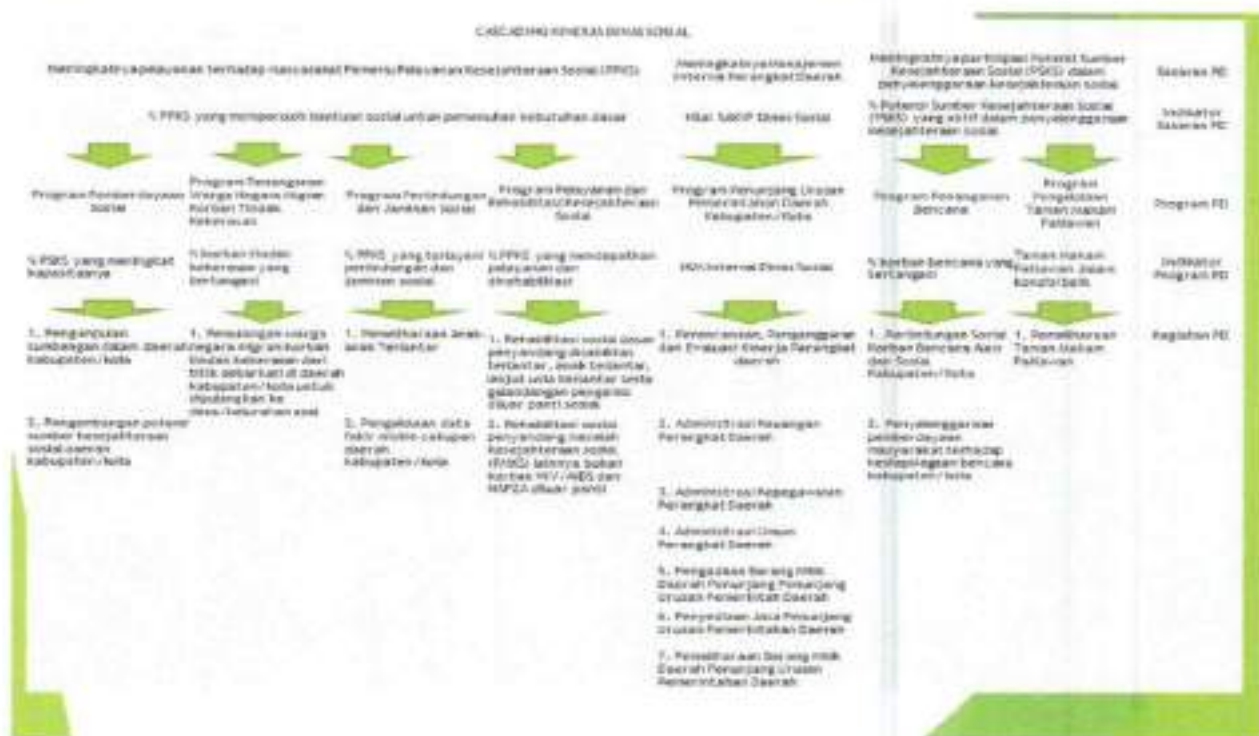
Gambar 4.1.5 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.2.6 Cascading Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan pada
Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk Tahun 2022 berpedoman dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja Daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RENJA memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan untuk tahun 2022, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja (RENJA).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2022.

Komponen Rencana Kinerja Tahunan pada Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran / kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja. Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu.

Di dalam Rencana Kinerja pada Tahun 2022, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan. Kinerja Dinas Sosial juga merupakan agregasi dari kinerja masing-masing bidang yang berasal dari kinerja masing-masing bidang yang berada di

bawahnya dalam melaksanakan tupoksinya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam Renstra.

Program dan Kegiatan

Urusan Sosial di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melalui 7 Program (meliputi 6 Program Pembangunan dan 1 Program Rutin), 14 kegiatan (meliputi 7 kegiatan pembangunan dan 7 kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) dan 52 kegiatan (meliputi 31 Sub Kegiatan pembangunan dan 21 Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) :

8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi :
 - 1.8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - 1.8.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.8.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - 1.9.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.9.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.9.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - 1.10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 1.10.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.10.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 1.11. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - 1.11.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.11.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.11.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.11.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.11.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.11.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 1.12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- 1.12.1. Pengadaan Mebel;
- 1.12.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 1.13.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.13.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.13.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 1.14.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 1.14.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 1.14.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 9. Program Pemberdayaan Sosial
 - 9.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :
 - 9.1.1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 9.1.2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 9.1.3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 9.1.4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 9.1.5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- 10. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - 10.1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal :
 - 10.1.1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
- 11. Program Rehabilitas Sosial

- 11.1. Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :
 - 11.1.1. Penyediaan Permakanan;
 - 11.1.2. Penyediaan Sandang;
 - 11.1.3. Penyediaan Alat Bantu;
 - 11.1.4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - 11.1.5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
 - 11.1.6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
 - 11.1.7. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;
 - 11.1.8. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
 - 11.1.9. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
 - 11.1.10. Pembelian Layanan Kedaruratan;
 - 11.1.11. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
12. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 12.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
 - 12.1.1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 12.1.2. Pengelolaaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 12.1.3. Fasilitas Bantuan Sosial Kekeluargaan;
 - 12.1.4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
13. Program Penanganan Bencana
 - 13.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota :
 - 13.1.1. Penyediaan Makanan;
 - 13.1.2. Penyediaan Sandang;
 - 13.1.3. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
 - 13.1.4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
 - 13.1.5. Pelayanan Dukungan Psikososial.
 - 13.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota :
 - 13.2.1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;

13.2.2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Taruna
Bencana.

14. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

14.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota :

14.1.1. Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

14.1.2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota;

14.1.3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, serta merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
3. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP .

Dokumen Perjanjian Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata dana dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022.



REKAP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PK KEPALA DINAS SOSIAL			
	1.1 Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Prosentase PMRS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya 2. Prosentase Potensi Sumber Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya 3. Prosentase korban tindak kekerasan yang tertangani 4. Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	4.04 % 100 % 100 % 100 % 100 %	
	1.2 Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah	1. Nilai SAKIP Dinas Sosial 2. Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	84.78 % 83.10 %	
	1.3 Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Prosentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2. Prosentase korban bencana yang tertangani 3. Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 % 100 % 1 TMP	
2	PK SEKRETARIS			
	Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	83,10%	
	PK KASUBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI			
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	
	Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan yang tersusun	10 laporan	
	PK KASUBAG KEUANGAN			
	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	30 orang (1 laporan)	
	Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun	3 laporan	
	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan laporan KIB dan laporan barang pengguna bulanan, laporan keuangan bulanan, jumlah laporan semesteran	2 dokumen; 12 laporan; 1 laporan	

DINAS SOSIAL

	PK KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN			
	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	100%	
	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	12 laporan	
	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	
	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	
	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	
4	PK KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN			
	Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	1. Persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	
		2. jumlah pendataan fakir miskin	4 kali	
		3. jumlah pelaksanaan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	17 kali	
4.1	PK KASI BANTUAN STIMULAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN			
	4.1.1 Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaksanaan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	1 kali	
4.2	PK KASI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN			
	4.2.1 Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaksanaan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	1 kali	
4.3	PK KASI IDENTIFIKASI DAN PENGUATAN KAPASITAS			
	4.3.1 Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaporan pendataan PMKS	4 kali	
	4.3.2 Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaksanaan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	15 kali	
5	PK KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL			
	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	
5.1	PK KASI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA			
	5.1.1 Terpenuhinya penyediaan permakanan	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1500 anak	

	5.1.2 Terpenuhiya penyediaan sandang	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima paket sandang	500 orang	
	5.1.3 Terlaksananya Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	5 orang	
	5.1.4 Terlaksananya Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	5 orang	
5.2	PK KASI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG			
	5.2.1 Terlaksananya pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang direunifikasi dengan keluarga	30 orang	
	5.2.2 Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penelusuran keluarga	30 orang	
	5.2.3 Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan	jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	6 orang	
	5.2.4 Terlaksananya Pemberian layanan kedaruratan	jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit	
5.3	PK KASI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS			
	5.3.1 Terpenuhiya Penyediaan Alat Bantu	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang memanfaatkan alat bantu	5 orang	
	5.3.2 Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah singgah/shelter, dan/atau pusat kesejahteraan sosial	15 orang	
	5.3.3 Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	15 orang	
6	PK KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL			
	6.1 Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah PSKS yang berkembang	100 %	

DINAS SOSIAL

	6.2 Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	
6.1	PK KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN SOSIAL			
	6.1.2 Terlaksananya Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	151 orang	
6.2	PK KASI PEMBERDAYAAN PERORANGAN DAN KELUARGA			
	6.2.1 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kemampuan potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	81 Orang	
	6.2.2 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kemampuan potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	27 Orang	
	6.2.3 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50 Orang	
	6.2.4 Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	jumlah SDM LK3 yang meningkat kemampuan dan kekuatannya	18 Orang	
6.3	PK KASI PEMBERDAYAAN POTENSI KESETIAKAWANAN & RESTORASI SOSIAL			
	6.3.1 Terlaksananya Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	1 Paket	
	6.3.2 Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah terpeliharanya fasilitas TMP	2 tim pengamanan; 2 upacara	
	6.3.3 Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah pengamanan taman makam pahlawan yang dilakukan; jumlah pelaksanaan upacara	1 unit	
7	PK KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	7.1 Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100 %	
	7.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	persentase data fakir miskin yang dikelola	100 %	

DINAS SOSIAL

	7.3 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100 %	
	7.4 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Prosentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 %	
7.1	PK KASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM			
	7.1.1 Terpenuhi Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Desa	
	7.1.2 Terlaksananya Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	4 paket	
	7.1.3 Terlaksananya Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	60 Orang	
	7.1.4 Terlaksananya Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga yang dibentuk	1 unit	
7.2	PK KASI JAMINAN SOSIAL KELUARGA			
	7.2.1 Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengelolaan data fakir miskin	4 kali	
	7.2.2 Terlaksananya Fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	jumlah pelaksanaan fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	4 kali	
7.3	PK KASI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL			
	7.3.1 Terlaksananya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah pemberian fasilitas pemulangan pada warga negara migran korban tindak kekerasan	50 paket	
	7.3.2 Terpenuhi penyediaan makanan	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang	25 Orang	
	7.3.3 Terpenuhi penyediaan sandang	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang	10 orang	
	7.3.4 Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah tagana yang aktif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	1 unit	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja terhadap 7 Program (meliputi 6 Program Pembangunan dan 1 Program Rutin), 14 kegiatan (meliputi 7 kegiatan pembangunan dan 7 kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) dan 52 kegiatan (meliputi 31 Sub Kegiatan pembangunan dan 21 Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah mencapai kinerja, baik terkait pelaksanaan pembangunan dibidang Sosial. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator-indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (*performance gap*). Berdasarkan *performance gap* tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis skala penilaian pengukuran yang masing-masing terdiri dari 4 (empat) kategori sebagai berikut :

- a. Untuk pengukuran realisasi indikator sasaran, skala penilaiannya :

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 95 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 95 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran, skala penilaiannya :

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 95 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 95 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

A.1 PENCAPAIAN KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN

- Tujuan : 1. Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong.
- Sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS).
- Program : 1. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. Pemberdayaan Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
5. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Penanganan Bencana;
7. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

A.2 REALISASI KINERJA

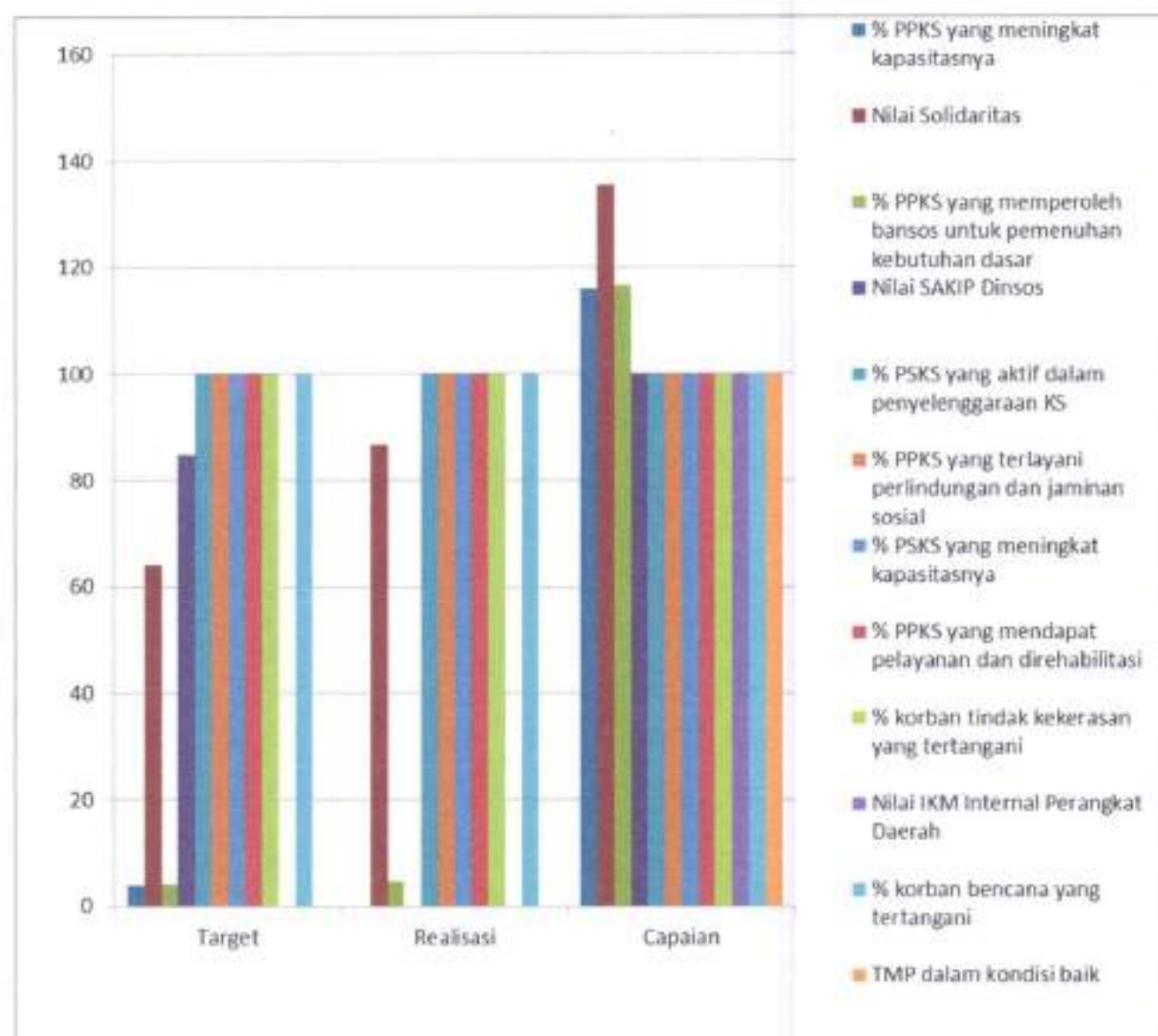
Analisis pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui:

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2022. Sesuai Lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah disepakati dengan uraian sebagai berikut:

Tabel A.2
Realisasi Kinerja Tahun 2022

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
A. TUJUAN :				
1. Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya	3,88 %	4,50 % $(124.519 - 118.914) / 124.519 \times 100\%$	116,01 %
2. Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	Nilai Solidaritas	84,06	86,77	135,45 %
B. SASARAN :				
1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4,04 %	4,71 % $(5.605 / 118.914) \times 100\%$	116,67 %
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	84,78 %	87,99%	103,79%
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	100 % 948/948	100 %
C. PROGRAM :				
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 % 118.914/118.914	100 %
2. Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya	100 %	100 % 948/948	100 %
3. Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi	100 %	100 % 24.415/24.415	100 %
4. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100 %	100 % 29/29	100 %
5. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	83,10%	83,13%	100,04 %
6. Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 % 8.638/8.638	100 %
7. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP	1 TMP	100 %

Grafik A.2.1
Realisasi Kinerja Tahun 2022



1. Capaian kinerja tujuan tahun 2022 pada indikator Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya menunjukkan angka 116,01% atau **Sangat Baik** dengan realisasi 4,50% melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,88%, bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 menunjukkan angka naik 0,71% artinya semakin tinggi realisasinya berarti persentase penurunan PPKS semakin cepat (progress positif). Hal ini terbukti bahwa jumlah PPKS yang tertangani semakin menurun jumlahnya yaitu tahun 2021 sebanyak 124.519 jiwa dan pada tahun 2022 menurun 118.914 jiwa.
2. Indikator sasaran Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terealisasi 4,71% dari yang ditargetkan 4,04% dengan capaian 116,67%, hal tersebut dikarenakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2022 sebanyak 118.914 jiwa atau menurun 5.605 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebanyak 124.519 jiwa.

3. Indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Sosial dengan target 84,78% terealisasi sebesar 87,99% dengan capaian sebesar 103,79%.
4. Indikator sasaran Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 948.
5. Indikator program Persentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah PPKS sebanyak 118.914 jiwa.
6. Indikator program Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah PSKS sebanyak 948 orang.
7. Indikator program Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi sebanyak 24.415 orang.
8. Indikator program Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah korban tindak kekerasan yang tertangani dalam hal ini orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan sebanyak 29 orang.
9. Indikator program Nilai IKM Internal Perangkat Daerah terealisasi 83,13% dari yang ditargetkan 83,10% dengan capaian 100,04%.
10. Indikator program Persentase korban bencana yang tertangani terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi sebanyak 8.638 jiwa.
11. Indikator program Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik terealisasi 1 TMP dari yang ditargetkan 1 TMP dengan capaian 100%.

Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2022 :

NO	JENIS PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Jumlah
1	Keluarga Fakir Miskin	79.773
2	Anak Jalanan	29
3	Tuna Susila *	-
4	Pengemis	48
5	Gelandangan & Gelandangan Perkotaan	40
6	Anak Balita Terlantar	1
7	Anak Terlantar	13.846
8	Anak Berhadapan Dengan Hukum	3
9	Anak Dengan Kelembatan	
	a Tubuh	57
	b Netra	14
	c Cacat Wicara	17
	d Mental	25
	e Cacat Ganda	13
10	Anak Yang menjadi Korban Tindak kekerasan atau diperlakukan salah	18
11	Anak Yang memerlukan perlindungan Khusus	-
12	Lanjut Usia Terlantar	10.017
13	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	
	a Tubuh	69
	b Netra	13
	c Cacat Wicara	10
	d Mental	-
	e Cacat Ganda	197
	f Penderita Penyakit Kronis	-
14	Pemulung	-
15	Kelompok Minoritas	-
16	Bukan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	-
17	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	196
18	Korban Penyalahgunaan Napza	-
19	Korban Trafficking	-
20	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	
	a Wanita	-
	b Laki-laki	-
	c Lanjut Usia	-
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	29
22	Korban bencana Alam	8.638
23	Korban Bencana Sosial	-
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	80
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	8.793
26	Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil	-
	JUNLAH	118.914

**REKAPITULASI POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
TAHUN 2022**

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Profesional	11
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	54
3	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
4	Penyuluh Sosial	2
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	40
6	Tenaga kesejahteraan Sosial kecamatan (TKSK)	27
7	Karang Taruna	474
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial	36
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
10	Dunia Usaha Yang Melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial	-
11	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	80
12	Keluarga Pioner	20
13	SDM PKH	203
	JUMLAH	948

A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s/d AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

Analisis pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui:

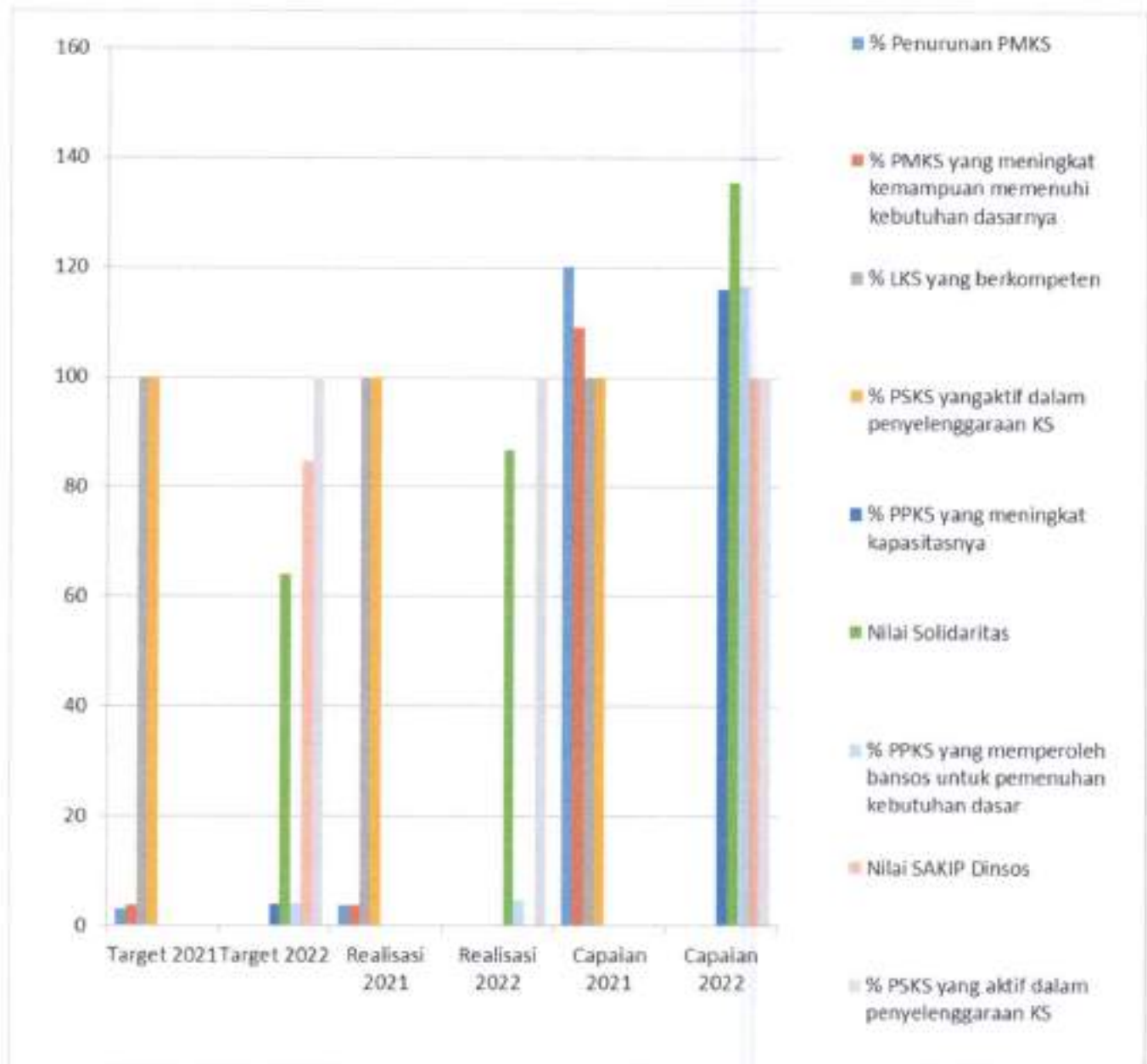
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 dan 2022.

Sesuai Lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 yang telah disepakati dengan uraian sebagai berikut:

Tabel A.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
s/d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		Th. 2021	Th. 2022	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2021	Th. 2022
RPJMD LAMA (2016-2021)							
A. TUJUAN :							
Meningkatkan pelayanan dan bantuan sosial dalam upaya penurunan PMKS	% Penurunan PMKS	3,05%		3,63%		119,02%	
B. SASARAN :							
1. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	% PMKS yang meningkat kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya	3,45%		3,77%		109,26%	
2. Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	% LKS yang Berkompeten	100%		100%		100%	
	% PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan KS	100%		100%		100%	
RPJMD BARU (2021-2026)							
A. TUJUAN :							
1. Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya		3,88 %		4,50 % (124.519-118.914)/124.519 x 100%		116,01 %
2. Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	Nilai Solidaritas		64,06		66,77		135,45 %
B. SASARAN :							
1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		4,04 %		4,71 % (5.605/118.914) x 100%		116,67 %
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial		64,78 %		67,69%		103,79 %
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100 %		100 % 948/948		100 %

Grafik A.3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
s/d Akhir Periode RPJMD/ RENSTRA



1. Capaian kinerja tujuan tahun 2022 pada indikator Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya menunjukkan angka 116,01% atau **Sangat Baik** dengan realisasi 4,50% melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,88%, bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 menunjukkan angka naik 0,71% artinya semakin tinggi realisasinya berarti persentase penurunan PPKS semakin cepat (progress positif). Hal ini terbukti bahwa jumlah PPKS yang tertangani semakin menurun jumlahnya yaitu tahun 2021 sebanyak 124.519 jiwa dan pada tahun 2022 menurun 118.914 jiwa.
2. Indikator sasaran Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar terealisasi 4,71% dari yang ditargetkan 4,04% dengan capaian 116,67%, hal tersebut dikarenakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2022 sebanyak 118.914 jiwa

atau menurun 5.605 jiwa dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebanyak 124.519 jiwa atau menurun 4.900 jiwa.

3. Indikator sasaran Nilai SAKIP Dinas Sosial dengan target 84,78% terealisasi sebesar 87,99% dengan capaian sebesar 103,79%.
4. Indikator sasaran Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2022 terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 948 orang dibandingkan dengan tahun 2021 terealisasi 100 % dari yang ditargetkan 100% dengan capaian 100%, jumlah PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 865 orang .

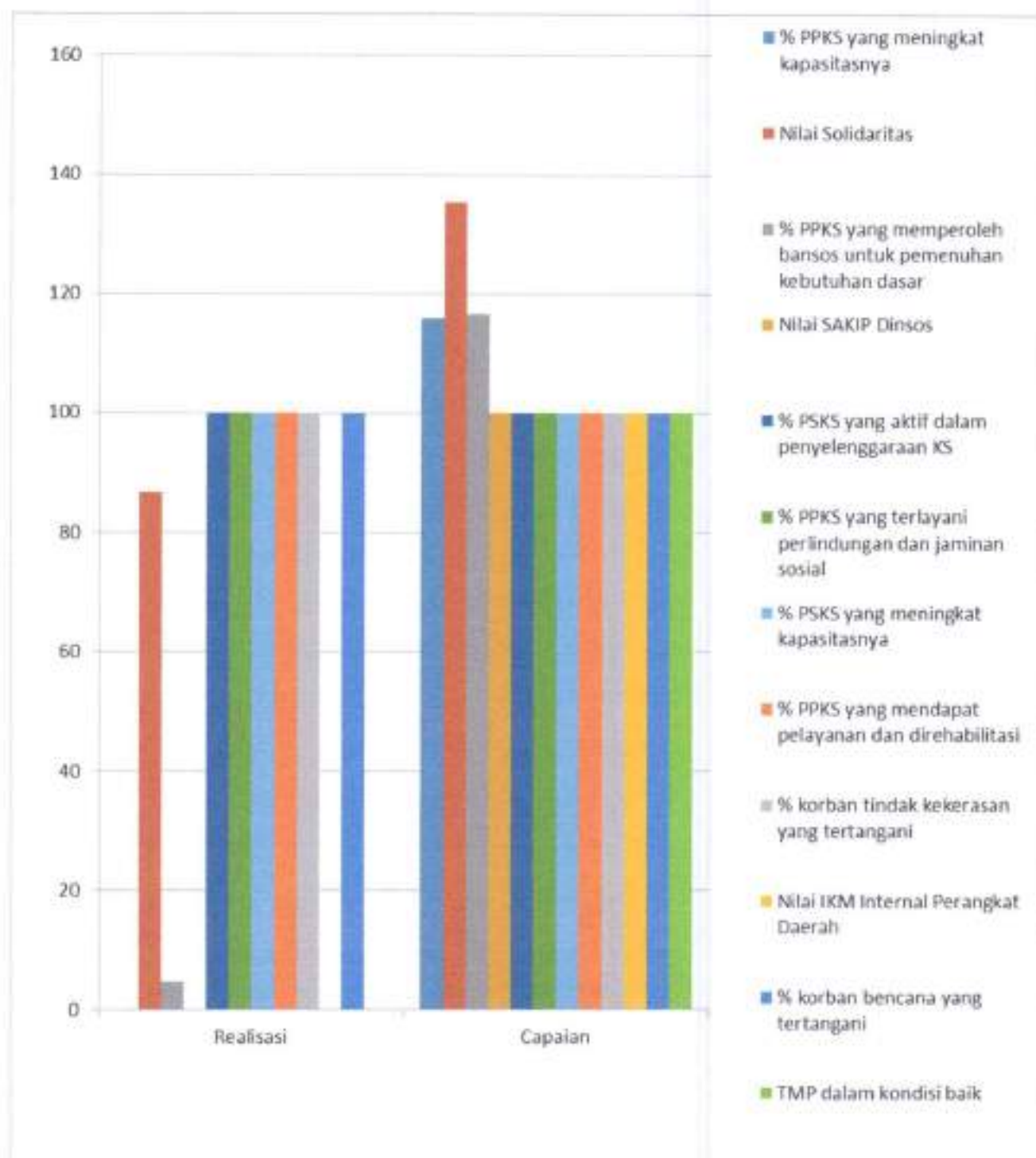
A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Tabel A.4
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dengan Realisasi Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN	
		2022	Nasional	2022	Nasional
A. TUJUAN :					
1. Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya	4,50 % $(124.519-118.914)/124.519 \times 100\%$		116,01 %	
2. Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	Nilai Solidaritas	86,77		135,45 %	
B. SASARAN :					
1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4,71 % $(5.605/118.914) \times 100\%$		116,67 %	
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	87,99%		103,79 %	
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (KS)	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 % 948/948		100 %	
C. PROGRAM :					
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100 % 116.914/118.914		100 %	
2. Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya	100 % 948/948		100 %	
3. Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan direhabilitasi	100 % 24.415/24.415		100 %	
4. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	100 % 29/29		100 %	

5. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	83,13%		100,04 %	
6. Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100 % 8.638/8.638		100 %	
7. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	1 TMP		100 %	

Grafik A.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dengan Realisasi Nasional



Capaian kinerja pada indikator di atas tidak dapat diperbandingkan dengan capaian Nasional, PPKS yang tertangani, mengingat terdapat perbedaan indikator. sarana sosial yang memberikan pelayanan layak dan pemberdayaan PSKS Nasional tidak memiliki indikator dimaksud.

A.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan

Adanya kenaikan realisasi tujuan Dinsos 0,71% dari tahun sebelumnya dimana tahun 2022 realisasi sebesar 4,50% dan ditahun 2021 sebesar 3,79%. Kenaikan ini berada pada :

1. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Yakin Semua Sejahtera (YSS) yaitu Bantuan Modal Usaha pada 80 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP).
2. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Permakanan pada Lansia berupa Sembako sebanyak 1.500 lansia.
3. Adanya Program Prioritas Bupati Lamongan yaitu Pemberian Sandang pada Anak asuh Keluarga Miskin berupa Peralatan Ibadah sebanyak 500 anak.
4. Adanya Program Nasional BLT Cukai (BDHCHT) yaitu bantuan pada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani sebanyak 6.793 orang.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi personil, terdapat 4 bidang dan 1 Sekretariat dimana ada 4 Kabid, 1 Sekretaris, 3 Kasubag di Sekretariat, 12 Pejabat Fungsional, 5 Staf PNS dan 29 Tenaga Kontrak yang menangani.

A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Sebagai penunjang keberhasilan dan pencapaian kinerja Bidang Sosial di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan melalui 7 Program (meliputi 6 Program Pembangunan dan 1 Program Rutin), 14 kegiatan (meliputi 7 kegiatan pembangunan dan 7 kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin) dan 52 kegiatan (meliputi 31 Sub Kegiatan pembangunan dan 21 Sub Kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan rutin), adapun program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, membawahi :
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - 1.5.1. Pengadaan Mebel;
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - 2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota :
 - 2.1.1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.1.2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.1.3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.1.4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - 2.1.5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 - 3.1 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal :
 - 3.1.1 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.
4. Program Rehabilitas Sosial
 - 4.1 Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :
 - 4.1.1 Penyediaan Permakanan;
 - 4.1.2 Penyediaan Sandang;
 - 4.1.3 Penyediaan Alat Bantu;
 - 4.1.4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
 - 4.1.5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;

- 4.1.6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- 4.1.7 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak;
- 4.1.8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- 4.1.9 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 4.1.10 Pembelian Layanan Kedaruratan;
- 4.1.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
- 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 5.1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
 - 5.1.1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.2 Pengelolaaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5.1.3 Fasilitas Bantuan Sosial Kekeluargaan;
 - 5.1.4 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- 6. Program Penanganan Bencana
 - 6.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota :
 - 6.1.1 Penyediaan Makanan;
 - 6.1.2 Penyediaan Sandang;
 - 6.1.3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
 - 6.1.4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
 - 6.1.5 Pelayanan Dukungan Psikososial.
 - 6.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota :
 - 6.2.1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
 - 6.2.2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Taruna Bencana.
- 7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - 7.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota :
 - 7.1.1 Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
 - 7.1.2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;

7.1.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan Kegiatan yang terealisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dalam rangka pengembangan bidang sosial pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 22.704.056.545,- dan realisasi sebesar Rp. 22.211.967.809,- atau 97,83% dan capaian target kinerja 116,01%.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	SOSIAL	22.704.056.545	22.211.967.809	97,83%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.987.108.100	4.788.576.609	96%
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000	71.572.500	89,47%
1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	10.676.500	71,18%
1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000	60.896.000	93,69%
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.568.544.100	3.469.501.495	97,22%
1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.523.544.100	3.424.508.995	97,19%
1.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	14.996.400	99,98%
1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000	29.996.100	99,99%
1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	59.500.000	99,17%
1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000	29.500.000	98,33%
1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	30.000.000	100%
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.000.000	82.212.700	76,83%
1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	12.000.000	100%
1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	9.626.100	96,26%
1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	100%
1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	10.000.000	100%
1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	9.310.000	62,07%
1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.000.000	26.276.600	58,39%
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.085.400	160.167.800	92,54%
1.2.07.05	Pengadaan Mebel	41.000.000	40.499.800	98,78%
1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.085.400	119.668.000	90,60%
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.584.000	563.012.122	95,17%
1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	62.626.762	86,98%
1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	100%
1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	509.584.000	490.385.360	96,24%
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.914.600	382.609.992	98,89%
1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.914.600	113.992.900	97,50%

1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	20.000.000	100%
1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000	248.617.092	99,45%
2	Program Pemberdayaan Sosial	15.545.765.475	15.426.278.250	99,23%
2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15.545.765.475	15.426.278.250	99,23%
2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	18.900.000	75,60%
2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000	122.400.000	94,15%
2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12.634.088.475	12.728.308.050	99,18%
2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.541.677.000	2.541.677.000	100%
2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.000.000	15.000.000	100%
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	30.000.000	10.754.000	35,85%
3.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	30.000.000	10.754.000	35,85%
3.2.01.01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal	30.000.000	10.754.000	35,85%
4	Program Rehabilitas Sosial	575.900.000	539.070.000	93,60%
4.2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	575.900.000	539.070.000	93,60%
4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	186.900.000	181.905.000	97,33%
4.2.01.02	Penyediaan Sandang	180.000.000	179.875.000	99,93%
4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	27.500.000	25.100.000	91,27%
4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	37.500.000	37.500.000	100%
4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.500.000	43.510.000	86,16%
4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	35.000.000	26.570.000	75,91%
4.2.01.07	Facilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000	5.000.000	100%
4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	5.000.000	100%
4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.000.000	6.000.000	100%
4.2.01.10	Pembelian Layanan Kedaruratan	12.500.000	12.500.000	100%
4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.000.000	16.110.000	53,70%
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.225.032.970	1.148.055.250	93,72%
5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.225.032.970	1.148.055.250	93,72%
5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	115.538.400	92,43%
5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	17.209.200	68,84%
5.2.02.03	Facilitas Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga	225.000.000	209.472.400	93,10%
5.2.02.04	Facilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	850.032.970	805.835.250	94,80%
6	Program Penanganan Bencana	237.500.000	177.608.700	74,78%
6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	87.500.000	47.279.700	54,03%
6.2.01.01	Penyediaan Makanan	17.500.000	12.465.400	71,23%
6.2.01.02	Penyediaan Sandang	17.500.000	8.578.300	49,02%

6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	17.500.000	925.000	5,29%
6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	17.500.000	13.330.000	76,17%
6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	17.500.000	11.981.000	68,46%
6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	130.329.000	86,89%
6.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	69.426.900	55.176.900	79,47%
6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	80.573.100	75.152.100	93,27%
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	122.750.000	121.625.000	99,08%
7.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	122.750.000	121.625.000	99,08%
7.2.01.01	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.000.000	24.500.000	98%
7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	100%
7.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	72.750.000	72.125.000	99,14%

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 4.967.108.100,- dan realisasi sebesar Rp. 4.788.576.609,- atau 96 % fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.80.000.000,00,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.71.572.500,- atau 89,47% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.676.500,- atau 71,18% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan, manmin dan perdin biasa disesuaikan kebutuhan.
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.65.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.60.896.000,- atau 93,69% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan, manmin dan perdin biasa disesuaikan kebutuhan serta honor pejabat pengadaan yang ditiadakan.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.568.544.100,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.469.501.495,- atau 97,22% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.523.544.100,-, yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.424.508.995,- atau 97,19% fisik sebesar 100%.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.14.966.400,- atau 99,98% fisik sebesar 100%.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.996.100,- atau 99,99% fisik sebesar 100%.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 59.500.000,- atau 99,17% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.500.000,- atau 98,33% fisik sebesar 100%.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.107.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.82.212.700,- atau 76,83% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
 2. Penyediaan peralatan rumah tangga, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.626.100,- atau 96,26% fisik sebesar 100%.

3. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.9.310.000,- atau 62,07% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi dana sebesar Rp.45.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.26.276.600,- atau 58,39% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- e) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.173.085.400,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.160.167.800,- atau 92,54% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
 1. Pengadaan mebel, dengan alokasi dana sebesar Rp.41.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.40.499.800,- atau 98,78% fisik sebesar 100%.
 2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.132.085.400,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.119.668.000,- atau 90,60% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- f) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp.591.564.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.563.012.122,- atau 95,17% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp.72.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar

- Rp.62.626.762,- atau 86,98% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan alokasi dana sebesar Rp.509.564.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.490.385.360,- atau 96,24% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
- g) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah , dengan alokasi dana sebesar Rp.386.914.600,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.382.609.992,- atau 98,89% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, dengan alokasi dana sebesar Rp.116.914.600,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.113.992.900,- atau 97,50% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.20.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100% dikarenakan pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan alokasi dana sebesar Rp.250.000.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.248.617.092,- atau 99,45% fisik sebesar 100%.
- 2) Program Pemberdayaan Sosial , dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.15.545.765.475,- dan realisasi sebesar Rp.15.426.278.250,- atau 99,23% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui kegiatan :
- a) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.545.765.475,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar

Rp.15.426.278.250,- atau 99,23% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,-, yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.18.900.000,- atau 75,60% fisik sebesar 100%. Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam melakukan pembinaan terhadap 54 orang PSM.
 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.130.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan berupa operasionalnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.122.400.000,- atau 94,15% fisik sebesar 100%. Dinas Sosial memberdayakan Mitra Dinsos yaitu Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam melakukan pembinaan terhadap 27 orang TKSK.
 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.834.088.475,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.12.728.308.050,- atau 99,18% fisik sebesar 100%. Adanya Program Nasional BLT Cukai (BDHCHT) yaitu bantuan pada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani sebanyak 6.793 orang.
 4. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.2.541.677.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.2.541.677.000,- atau 100% fisik sebesar 100%. Kegiatannya bansos permakanan untuk penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 36 LKSA atau 1.360 anak.
 5. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.30.000.000,- dan realisasi sebesar

Rp.10.754.000,- atau 35,85% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.754.000,- atau 35,85% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.754.000,- atau 35,85% fisik sebesar 100% yaitu penanganan pada 29 orang terlantar, kehabisan bekal dan kecopetan. Mengingat pada Sub Kegiatan tersebut merupakan kondisi *Insidentil* berdasarkan laporan Kepolisian.

- 4) Program Rehabilitasi Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.575.900.000,- dan realisasi sebesar Rp.539.070.000,- atau 93,60% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a). Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.575.900.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.539.070.000,- atau 93,60% fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub kegiatan :

1. Penyediaan Permakanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.186.900.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.181.905.000,- atau 97,33% fisik sebesar 100%.
2. Penyediaan Sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.180.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.179.875.000,- atau 99,93% fisik sebesar 100%.
3. Penyediaan Alat Bantu, dengan alokasi dana sebesar Rp.27.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.100.000,- atau 91,27% fisik sebesar 100%.

4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.37.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.37.500.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
 5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.50.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.43.510.000,- atau 86,16% fisik sebesar 100%.
 6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar serta gelandangan pengemis dan masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.35.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 26.570.000,- atau 75,91% fisik sebesar 100%.
 7. Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran dan kartu identitas anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
 8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.5.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
 9. Pemberian layanan data dan pengaduan, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.6.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
 10. Pemberian layanan kedaruratan, dengan alokasi dana sebesar Rp.12.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.500.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.16.110.000,- atau 53,70% fisik sebesar 100%.
- 5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.1.225.032.970,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.1.148.055.250,- atau 93,72% dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :

- a) Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.225.032.970,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.1.148.055.250,- atau 93,72% dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
1. Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.125.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.115.538.400,- atau 92,43% fisik sebesar 100%.
 2. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.17.209.200,- atau 68,84% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
 3. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, dengan alokasi dana sebesar Rp.225.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.209.472.400,- atau 93,10% fisik sebesar 100% berupa operasional PKH.
 4. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat, dengan alokasi dana sebesar Rp.850.032.970,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.805.835.250,- atau 94,80% fisik sebesar 100% meliputi Program Prioritas Bupati Lamongan Yakin Semua Sejahtera (YSS).
- 6) Program Penanganan Bencana, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.237.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 177.608.700,- atau 74,78% sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan :
- a) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 87.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar Rp. 47.279.700,- atau 54,03% sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
1. Penyediaan makanan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.465.400,- atau 71,23% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
 2. Penyediaan sandang, dengan alokasi dana sebesar Rp.17.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp.8.578.300,- atau 49,02% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.

3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi, dengan alokasi dana sebesar Rp.17.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 925.000,- atau 5,29% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan, dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 13.330.000,- atau 76,17% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
 5. Pelayanan dukungan psikososial, dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.500.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 11.981.000,- atau 68,46% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
- b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota, dengan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali dan realisasi sebesar Rp.130.329.000,- atau 86,89 % sesuai kebutuhan dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan:
1. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp. 69.426.900,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 55.176.900,- atau 79,47% sesuai kebutuhan, fisik sebesar 100%.
 2. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana, dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.573.100,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.152.100,- atau 93,27% fisik sebesar 100%.
- 7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 122.750.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp. 121.625.000,- atau 99,08 % dan fisik sebesar 100%. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Kegiatan:
- a) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 122.750.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan dan realisasi sebesar Rp.121.625.000,- atau 99,08 % dan fisik sebesar 100 %. Adapun rincian penggunaan anggaran dilaksanakan melalui Sub Kegiatan :

1. Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 1 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 24.500.000,- atau 98% fisik sebesar 100%.
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 12 bulan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100% fisik sebesar 100%.
3. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan alokasi dana sebesar Rp. 72.750.000,- yang berlokasi di Kabupaten Lamongan dengan volume kegiatan 2 kali upacara Hari Pahlawan dan HKSN. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 72.125.000,- atau 99,14% fisik sebesar 100% .

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah merupakan upaya pencapaian sistem akuntabilitas kinerja sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dibidang sosial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LKjIP Tahun 2022 ini, dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan media pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Lamongan terhadap hasil penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan Dinas Sosial Kabupaten Lamongan tahun 2022 menunjukkan angka 116,01% atau sangat baik.

Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

- 1) Pemberian bansos belum tepat sasaran;
- 2) Pemberian bantuan penanggulangan bencana masih belum optimal.

2. Saran.

Untuk selanjutnya guna lebih mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka terhadap program-program yang telah ditetapkan khususnya terkait kebutuhan dasar masyarakat (sebagaimana RPJMD 2021-2026), disarankan ditingkatkan alokasi anggarannya sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kajian evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, hasil prestasi dapat dicapai antara lain :

1. PKH Award katagori verifikasi terbaik Tingkat Nasional Tahun 2012.
2. Karang Taruna " Tunas Harapan " Desa Mungli Kecamatan Kalitengah berprestasi Tingkat Nasional (10 Besar Tingkat Nasional) Tahun 2012.
3. Penghargaan KUBE terbaik tingkat nasional tahun 2015.
4. Penghargaan KUBE terbaik ke-3 tingkat Jawa Timur tahun 2017.

5. Penghargaan Pendamping Eks Pasung Jawa Timur tahun 2017.
6. Penghargaan terbaik ke-3 Jawa Timur tahun 2017 Penyaluran dan Pelunasan Tebusan Rastra.
7. Penghargaan Lomba Ayo Inklusif tahun 2018, Program Aku Bisa Teman (Bina Disabilitas Sejahtera Mandiri dan Bahagia).
8. Juara III Pilar Sosial TKSK Jawa Timur tahun 2018.
9. Juara I Penyuluh Agama Islam Tk. Nasional tahun 2018 Pengasuh LKS Format a.n Mukhlis Sajaya.
10. Penghargaan sebagai Pilar-pilar Sosial Berprestasi Tingkat Nasional dari Menteri Sosial RI tahun 2021 untuk SDH PKH Kec. Laren Kab. Lamongan a.n Nastainul Hasan, S.Pd.
11. Juara I Lomba Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 LKSA AISYIYAH Babat Lamongan.
12. Desember 2022 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di nyatakan " KOMPETEN " angkatan 22 dan 23 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementrian Sosial RI. Adapun nama-namanya sbb :
 1. Ali Fatkurrozi.
 2. Ilham Sujiono.
 3. Khotimah.
 4. Marjuki.
 5. Ninik Wahyu Ningsih.
 6. Anwar.
 7. Widiyanto.

Lamongan, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN**


Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2021-2026

INSTANSI : DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

MISI 1 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah

SASARAN : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Peningkatan Kualitas Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial bagi PPKS	Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
			Peningkatan modal sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	
			Pengembangan Mutu dan Kemampuan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial		
	2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Mengusulkan pendidikan dan pelatihan secara berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Tenaga Peneliti		
			Meningkatkan Sistem Pelayanan Administrasi Perkantoran		

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

MISI 4 : Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif dalam Pembangunan serta lingkungan

SASARAN : Meningkatnya Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong Royong

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong Royong	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1. Pemberdayaan PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program Penanganan Bencana dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			2. Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
			3. Pengembangan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PPKS		


KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. HAMDANI AZAHARI, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19651021 198602 1 003

RENTAS KERJA
KEMERIA PULCON 11

KINERJA ESELON II/ IKD								KINERJA ESELON II/ IKD									
TUJUAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN/PROGRAM PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SASARAN/PROGRAM PD	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
TUJUAN DINOS 1 :								SASARAN PD 1 :									
Meningkatkan Kesejahteraan Pemerole Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pemerole Pemerole Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kapasitasnya	1,88%	4,50%	116,01%	22.343.808.545	23.952.794.328	98	Untuk mengetahui peningkatan PPKS yang meningkat kapasitasnya	Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat Pemerole Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4,04%	4,71%	116,87%	17.376.882.445	17.134.157.500	99	PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi	
								PROGRAM PD									
								Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang terlayani perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	1.235.042.970	1.148.055.250	94	PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial yang terdiri dari RSI-OKM, RSH, Sembako, Kube Fakir Miskin	
								Pembinaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%	15.545.795.475	15.426.279.250	99	PSKS (TKSC, LKS, PSM, PDU, FORUM ULS, KARANGTARUNA) yang mendapat pembinaan	
								Pemangsaan Warga Negara Migrant Korban Tidak Kekerasan	Persentase korban tidak kekerasan yang tertangani	100%	100%	100%	30.000.000	30.754.000	98	Korban tidak kekerasan yang mendapat penanganan yaitu terbitnya pemulangan	
								Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi	100%	100%	100%	575.900.000	539.070.000	94	PPKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi yaitu pemukiman, sandang, alat bantu, layanan rehabilitasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan sosial pada keluarga penyandang disabilitas terdampak, anak terlantar, lanjut usia terlantar, orang gelandangan pengemis dan masyarakat; pemberian nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; layanan data dan pengaduan; layanan bimbingan, layanan pemukiman keluarga.	
								SASARAN PD 2 :									
								Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dimas Sosial	94,78%	87,58%	103,79%	4.967.108.100	4.788.575.009	96	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Pemantauan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dibakukan oleh Inspektori	
								PROGRAM PD									
								Pemangjian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SMI Internal Perangkat Daerah	89,87%	82,13%	100,06%	4.967.108.100	4.788.575.009	96	Skala Internal	

KERTAS KERJA

KINERJA ESELON II

KINERJA ESELON II/ RD									KINERJA ESELON II/ RU								
TUJUAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SASARAN/PROGRAM PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SASARAN/PROGRAM PD	INDIKATOR SASARAN/PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
TUJUAN DINAS 2 :									SASARAN PD 3 :								
Meningkatkan Solidaritas Masyarakat dalam Bergotong royong	Nilai Solidaritas	94,06	99,77	135,45%	360.250.000	299.233.700	83	Pada prinsipnya Nilai Solidaritas untuk meningkatkan hubungan antar individu dan kelompok dengan didukung nilai-nilai moral dan gotong royong pada lingkungan masyarakat	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	100%	100%	100%	360.250.000	299.233.700	83	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) terdiri dari PSM, TKSK, Keluarga Pioner/PCI, UKS, Karangtaruna, LKS yang dibandayakan sehingga berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
									PROGRAM PD								
									Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%	217.500.000	177.608.700	75	Penanganan bencana alam dan sosial baik pra maupun pasca bencana
									Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terser Makam Pahlawan dalam kondisi baik	1 TMF	1 TMF	100%	122.750.000	121.625.000	99	TMF yang dikelola

KINERJA ESOLON IV/Pejabat Fungsional

KINERJA ESELON II									KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional								
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSK yang berkembang	751 org	701 org	93%	15.545.765.475	15.426.276.250	99%	PSKS (TKSK, LKS, PSM, FCU, FORUM LKS, KASANGTARUNA) yang dibentuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Peberja Sosial Masyarakat Kemungkinan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang meningkat kemampuan potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	81 orang	81 orang	100%	15.000.000	18.900.000	75,62%	peningkatan kapasitas individu PSMT untuk melakukan tugas
									Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kemungkinan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kemampuan potensinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	27 orang	27 orang	100%	130.000.000	122.400.000	94,23%	peningkatan kapasitas individu TKSK untuk melakukan tugas
									Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kemungkinan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	50 keluarga	50 keluarga	100%	11.834.068.475	12.728.308.050	99,18%	peningkatan kapasitas individu FKJ untuk melakukan tugas
									Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kemandirian Masyarakat Kemungkinan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kemandirian Masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	151 orang	151 orang	100%	2.541.677.000	2.541.677.000	100%	peningkatan kapasitas individu Karang Taruna dan Forum LKS untuk melakukan tugas
									Peningkatan Kemampuan Potensi Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Keluarga (LKS)	Jumlah SDM LKS yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya	18 orang	18 orang	100%	15.000.000	15.000.000	100%	peningkatan kapasitas individu LKS untuk melakukan tugas

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON III

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional

KINERJA ESELON III									KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional								
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debariasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	100%	100%	100%	10.000.000	10.754.000	35,85%	pemberian Fasilitas pemulangan	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debariasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah pemberian fasilitas pemulangan pada warga negara migran korban tindak kekerasan	25 paket	25 paket	100%	10.000.000	10.754.000	35,85%	peningkatan kapasitas individu PSN untuk melakukan tugas
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	persentase data fakir miskin yang dikelola	100%	100%	100%	1.225.032.970	1.148.855.250	93,72%	Data kemiskinan (DTK) yang dijadikan dasar dalam pemberian Bantuan	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pendataan fakir miskin	4 kali	4 kali	100%	125.000.000	135.538.400	92,43%	update DTK
									Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengelolaan data fakir miskin	4 kali	4 kali	100%	25.000.000	17.205.200	68,80%	update data FBI-JEM dan FBI-D
									Facilitas Bantuan Sosial kesejahteraan keluarga	jumlah pelaksanaan fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	4 kali	4 kali	100%	125.000.000	309.472.400	95,16%	pemberian bantuan pada masyarakat tidak mampu (program PKH)
									Facilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	jumlah pelaksanaan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	17 kali	17 kali	100%	850.032.970	805.830.250	94,80%	pemberian bantuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat melalui UCP/Yaku/Pemberdayaan

KERTAS KERJA
KINERJA SESUAI IS

KERTAS KERJA
ENERGI ESELOW Fe/7Polebat Fungsional

KEMERJA ESELON III								KEMERJA ESELON IV (Pejabat Fungsional)									
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	100%	100%	575.900.000	539.070.000	93,60%	PPES yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi yaitu permaknaan, pendang, alat bantu, layanan rehabilitasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, bimbingan sosial pada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat; pemberian nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat rujuk dan kartu identitas anak; akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar; layanan duka dan pengkabung; layanan keberurutan; layanan pemukiman keluarga	Penyediaan Permakanan	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima paket permaknaan sesuai standar gizi	1.500 Orang	1.500 Orang	100%	186.900.000	183.905.000	97,93%	makanan sesuai standar gizi mengandung gizi seimbang protein, karbohidrat, serat, vitamin dan mineral
									Penyediaan Sandang	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima paket sandang	500 Orang	500 Orang	100%	180.000.000	179.875.000	99,93%	sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai muksuk bertudaya yang melindungi diri dari cuaca
									Penyediaan Alat Bantu	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menggunakan alat bantu	5 Orang	5 Orang	100%	27.500.000	25.100.000	91,27%	alat bantu yang mengatasi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak
									Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang diidentifikasi dengan keluarga	30 Orang	30 Orang	100%	37.500.000	37.500.000	100%	mempertemukan dan mengembalkan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis kepada keluarga dar/ atau keluarga sedarah
									Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah singgah/shelter, dan/atau pusat keberagamaan sosial	15 Orang	15 Orang	100%	50.500.000	43.510.000	86,96%	bimbingan fisik adalah bimbingan untuk pemeliharaan pertumbuhan dan perkembangan jasmani; bimbingan mental dan spiritual adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui tatanan tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan merta/Ujwa; bimbingan sosial adalah bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial;

Pemberian Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Menyarakat	jumlah bimbingan sosial yang dilakukan kepada keluarga dan masyarakat	15 Orang	15 Orang	100%	21.000.000	26.570.000	75,91%	bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah masalah sosial bagi keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
Facilitasi Penguatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	1 Orang	1 Orang	100%	5.000.000	5.000.000	100%	mempemudah akses pembuatan Dokumen kependudukan
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1 Orang	1 Orang	100%	5.000.000	5.000.000	100%	mempemudah akses layanan pendidikan dan kesehatan
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	5 Orang	5 Orang	100%	5.000.000	5.000.000	100%	layanan data adalah layanan yang diberikan kepada anak terlantar untuk disalurkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial; layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial
Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1 unit	1 unit	100%	12.500.000	12.500.000	100%	layanan kedaruratan merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial kepada anak terlantar yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
Pendataan Pelayanan Perencanaan Keluarga	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan perencanaan keluarga	30 Orang	30 Orang	100%	30.000.000	16.130.000	53,70%	memudahkan keberadaannya keluarga dan/atau keluarga terdekat

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON III

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional

KINERJA ESELON III									KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional								
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Reduksi Dampak Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pemerataan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100%	100%	100%	67.500.000	67.779.700	94,03%	penanganan bencana alam dan sosial baik pra maupun pasca bencana	Penyediaan Mulaian	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang	25 Orang	81 orang	300%	17.500.000	12.465.400	71,23%	mulaian untuk menunjang keberlangsungan hidup bertahan dan bencana
									Penyediaan Sandang	jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang	10 Orang	77 orang	100%	17.500.000	4.576.900	49,02%	tersedianya kebutuhan sandang untuk warga yang terdampak bencana
									Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 Blok	30 keluarga	100%	17.500.000	925.000	5,29%	tersedianya tempat penampungan pengungsi
									Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	jumlah paket pemukiman khusus bagi kelompok rentan	4 paket	151 orang	100%	17.500.000	11.330.000	76,17%	tersedianya penanganan khusus bagi kelompok rentan
									Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	50 Orang	18 orang	90%	17.500.000	11.961.000	68,36%	dukungan psikis pasca bencana pada korban bencana
Penyelenggaraan Pembentayan Masyarakat terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pemerataan pembangunan masyarakat terhadap bencana	100%	100%	100%	190.000.000	136.329.000	86,86%	pembentayan TAGAMA terhadap kewaspadaan bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga yang dibentuk	1 unit	1 unit	100%	89.426.900	55.176.900	79,47%	kampung siaga bencana saat penanganan bencana
									Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Torus Siaga Bencana	jumlah torus yang aktif dalam pelaksanaan pemangulangan bencana	40 Orang	40 Orang	100%	80.573.100	75.152.100	93,27%	kegiatan Torus dalam melaksanakan tugas penanganan bencana

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON III

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional

KINERJA ESELON III								KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional									
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Pemeriksaan Tatanan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah tatanan makam pahlawan yang terpelihara	1 TMP	1 TMP	100%	122.750.000	121.625.000	99	TMP yang terpelihara dengan baik, begitu juga dengan terpasang dan pengamanannya	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tatanan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	1 paket	1 paket	100%	25.000.000	24.500.000	98%	sarana yang direhab
									Pemeliharaan Tatanan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah terpeliharanya fasilitas TMP	1 unit	1 unit	100%	25.000.000	25.000.000	100%	fasilitas TMP yang dipelihara
									Pengamanan Tatanan Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan tatanan makam pahlawan yang dilakukan; jumlah pelaksanaan upacara	2 tin pengamanan; 2 laporan (MCSN & Hari Pahlawan/Tat Asth)	2 tin pengamanan; 2 laporan (MCSN & Hari Pahlawan/Tat Asth)	100%	72.750.000	72.125.000	99,14%	pengamanan TMP

NIPTAS KIRIL
KIPERIA GSG/006 IV/Pujakus Panglimat

KINERJA ESELON III								KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional									
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	17 dokumen	17 dokumen	100%	80.000.000	71.572.500	89,47%	dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun	Penyusunan dokumen perencanaan tingkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	100%	25.000.000	22.576.500	71,38%	dokumen perencanaan yang disusun
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan yang disusun	10 laporan	10 laporan	100%	65.000.000	60.896.000	89,99%	laporan yang disusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	26 dokumen	26 dokumen	100%	3.588.544.100	3.409.503.495	87,22%	laporan keuangan yang disusun	Penyediaan Gap dan Turunang Asih	jumlah ASN yang mendapat gap dan turunang	10 orang (1 laporan)	10 orang (1 laporan)	100%	3.523.544.100	3.424.508.996	97,19%	laporan gap
									Kordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah laporan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	100%	13.000.000	14.396.400	99,98%	laporan akhir tahun
									Kordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan LTB dan laporan barang pengguna bulanan; jumlah laporan semesteran	11 laporan	11 laporan	100%	30.000.000	29.996.100	99,99%	laporan LTB dan laporan barang pengguna bulanan; jumlah laporan semesteran
Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Pembinaan pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	100%	100%	100%	80.000.000	59.500.000	99,17%	pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	Pengadaan pakotian (dinas beserta atribut kelengkapannya)	jumlah pakotian dinas yang disediakan	55 paket	55 paket	100%	30.000.000	29.500.000	98,33%	pakotian dinas
									Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	6 orang	6 orang	100%	30.000.000	30.000.000	100%	ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON III

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional

KINERJA ESELON II								KINERJA ESELON II/Pejabat Fungsional									
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	12 laporan	12 laporan	100%	107.000.000	82.212.750	76,88%	laporan persediaan barang dan jasa	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	20 jenis alat listrik	20 jenis alat listrik	100%	12.000.000	12.000.000	100%	komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 buah	25 buah	100%	10.000.000	9.625.200	96,26%	peralatan rumah tangga
									Penyediaan Bahan Logistik kantor	jumlah bahan logistik yang disediakan	1 cek; 1 paket pengiriman; 80 ATK; 50 prangko; 420 material	1 cek; 1 paket pengiriman; 80 ATK; 50 prangko; 420 material	100%	15.000.000	15.000.000	100%	bahan logistik
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	14 cetakan dan penggandaan	14 cetakan dan penggandaan	100%	10.000.000	10.000.000	100%	barang cetakan dan penggandaan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Referensi Penunjang Pendidikan	jumlah bahan bacaan, literatur/ucapan	7 surat kabar; 23 ucapan	7 surat kabar; 21 ucapan	100%	15.000.000	9.350.000	62,33%	bahan bacaan, literatur/ucapan
									Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	107 kali	907 kali	100%	45.000.000	36.275.000	80,59%	rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan barang milik daerah perantara untuk pemerintah daerah	Persentase ketepatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%	100%	100%	173.085.400	160.167.800	92,54%	sarana dan prasarana	pengadaan mebel	jumlah mebel yang disediakan	58 Unit	58 Unit	100%	41.000.000	40.498.800	98,78%	mebel
									pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit printer gaj; 1 laptop; 1 unit AC; 1 unit scan; 4 almari	1 unit printer gaj; 1 laptop; 1 unit AC; 1 unit scan; 4 almari	100%	132.085.400	119.669.000	90,60%	peralatan dan perlengkapan kantor

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON III

KERTAS KERJA
KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional

KINERJA ESELON III									KINERJA ESELON IV/Pejabat Fungsional								
KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL	SUB KEGIATAN PD		KINERJA			ANGGARAN			DEFINISI OPERASIONAL
KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)		SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	100%	100%	591.554.000	569.012.122	96,17%	layanan jasa penunjang yang tersedia	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 unit	20 jenis abt listrik	100%	72.000.000	62.626.762	86,98%	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
									penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45 unit	25 buah	100%	60.000.000	60.000.000	100%	jasa peralatan dan perlengkapan kantor
									penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah tenaga kontrak	1 supervisor, 2 kasir/kasir, 2 kebersihan, 15 administrasi	1 cek, 1 paket pengaliran, 40 ATK, 50 proyek, 400 material	100%	509.554.000	496.385.360	98,04%	tenaga kontrak
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	186.914.600	182.909.992	98,89%	barang milik daerah dalam kondisi baik	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah pajak surut kendaraan yang terbayarkan (kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional); jumlah mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 mobil jabatan; 8 mobil operasional	58 Unit	100%	116.914.600	113.992.990	97,50%	pajak surut kendaraan yang terbayarkan (kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional); jumlah mobil jabatan dan kendaraan dinas/operasional
									pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 item	1 unit printer poj, 1 laptop, 1 unit AC, 1 unit scan, 4 almari	100%	20.000.000	20.000.000	100%	peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
									pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	250.000.000	248.917.002	99,45%	gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi



**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
STAF BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KUSNAH, SKM.
Jabatan : Staf Bidang Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : S. AGUS KURNIAWAN, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

Selaku atasan langsung dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

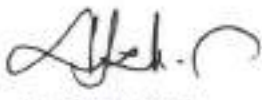
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Oktober 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN


S. AGUS KURNIAWAN, SE, MM
Pembina
NIP. 19740815 199503 1 001

PIHAK PERTAMA
STAF BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN


KUSNAH, SKM
Penata Muda Tk. I
NIP. 19780323 201101 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

No	Pekerjaan
(1)	(2)
1	Menerima tugas terkait Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial
2	Menerima arahan dan melaksanakan tugas dari pimpinan sehingga tugas-tugas pekerjaan dapat terselesaikan sesuai jadwal.

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN


S. AGUS KURNIAWAN, SE, MM
Pembina
NIP. 19740815 199503 1 001

Lamongan, Oktober 2022

PIHAK PERTAMA
STAF BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN


KUSNAH, SKM,
Penata Muda Tk. I
NIP. 19780323 201101 2 010



**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMROATUL MUHIMMATIN MUFIDAH, S.Sos
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI ANDAYANI, S.T.P
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial Dinas Sosial
Kabupaten Lamongan.

Selaku atasan langsung dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2022

PIHAK KEDUA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

TRI ANDAYANI, S.T.P
Penata

NIP. 19740418 201001 2 002

PIHAK PERTAMA
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

IMROATUL MUHIMMATIN M., S.Sos
Penata Muda

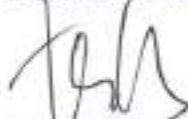
NIP. 19860512 202012 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

No	Pekerjaan
(1)	(2)
1	Menerima Tugas Terkait Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2	Menerima Tugas Terkait Pembinaan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Pembinaan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga, Pembinaan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
3	Menerima Tugas Terkait Dokumen Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan meliputi Dokumen Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan, Dokumen Pengamanan Tamana Makam Pahlawan yaitu Upacara hari Pahlawan dan Upacara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN).
4	Menerima Arahan dan Melaksanakan tugas dari pimpinan sehingga tugas-tugas pekerjaan dapat terselesaikan sesuai jadwal.

Lamongan, Januari 2022

PIHAK KEDUA
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN

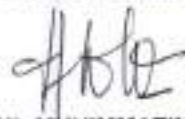


TRI ANDAYANI, S.T.P

Penata

NIP. 19740418 201001 2 002

PIHAK PERTAMA
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN



IMROATUL MUHIMMATIN M., S.Sos

Penata Muda

NIP. 19860512 202012 2 005

DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMROATUL MUHIMMATIN MUFIDAH, S.Sos
Jabatan : Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ERDIANA RENAWATI, S.E., MM.
Jabatan : Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
Selaku atasan langsung dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Oktober 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN


ERDIANA RENAWATI, S.E., MM.
Pembina
NIP. 19670206 199303 2 004

PIHAK PERTAMA
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN


IMROATUL MUHIMMATIN M., S.Sos
Penata Muda
NIP. 19860512 202012 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN

No	Pekerjaan
(1)	(2)
1	Menerima Tugas Terkait Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2	Menerima Tugas Terkait Pembinaan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Pembinaan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat, Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga, Pembinaan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
3	Menerima Tugas Terkait Dokumen Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan meliputi Dokumen Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan, Dokumen Pengamanan Tamana Makam Pahlawan yaitu Upacara hari Pahlawan dan Upacara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNN).
4	Menerima Arahan dan Melaksanakan tugas dari pimpinan sehingga tugas-tugas pekerjaan dapat terselesaikan sesuai jadwal.

Lamongan, Oktober 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN



ERDIANA RENAWATI, S.E., MM.
Pembina
NIP. 19670208 199303 2 004

PIHAK PERTAMA
PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELEMBAGAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN



IMROATUL MUHIMMATIN M., S.Sos
Penata Muda
NIP. 19860512 202012 2 005